



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman perlu dilakukan penetapan tunjangan kinerja yang adil, objektif, transparan, dan konsisten yang didasarkan pada hasil evaluasi jabatan, disiplin dan kinerja pegawai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Pariaman tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara RI Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5135);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kota adalah Kota Pariaman.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu bupati/walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
5. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Pegawai Negeri Sipil secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

6. Pegawai dipekerjakan adalah pegawai yang dibayarkan gajinya pada instansi induk, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya dibayarkan instansi penerima.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan berdasarkan beban kerja, tempat dan kondisi tugas, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya.
8. Hari adalah hari kerja
9. Hari kerja adalah hari yang digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya, baik bersifat pelayanan publik maupun pelayanan aparatur.
10. Hadir kerja adalah keadaan masuk kerja pada hari kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tugas kedinasan lainnya yang diketahui atasan.
11. Terlambat masuk kerja adalah datang tidak tepat pada waktu sesuai dengan jadwal kerja yang ditentukan.
12. Pejabat Penanggung Jawab adalah Kepala Satuan Organisasi Perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran.
13. Tugas adalah tugas utama yang merupakan penjabaran langsung dari tugas dan fungsi organisasi, serta tugas tambahan adalah tugas yang tidak tersebut dalam rincian tugas, tetapi memberikan manfaat bagi unit kerja.
14. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat yang dinilai dengan ketentuan serendah rendahnya pejabat eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
17. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
18. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

19. Kinerja adalah keluaran (output)/hasil (outcome) dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
20. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja atau unit kerja pada perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
21. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan sasaran dan tujuan perangkat daerah.
22. Inovasi adalah setiap ide ataupun gagasan baru yang belum pernah ada ataupun diterbitkan sebelumnya yang membawa kemajuan terhadap unit organisasi;
23. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disebut KUA adalah Kebijakan Umum Anggaran Daerah Pemerintah Kota Pariaman.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman adalah sebagai panduan dalam pengukuran kinerja serta penghitungan besaran tunjangan tambahan penghasilan yang akan diterima oleh masing-masing pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

Pasal 3

Pemberian Tambahan Penghasilan pegawai bertujuan:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan disiplin pegawai;
- c. meningkatkan kinerja pegawai;
- d. meningkatkan keadilan dan kesejahteraan pegawai; dan
- e. meningkatkan integritas pegawai.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dan aktif dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

BAB IV
KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
Pasal 5

- (1) Selain Penghasilan menurut peraturan perundang-undangan, tambahan penghasilan diberikan setiap bulan kepada PNS.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung berdasarkan disiplin dan kinerja yang berbasis elektronik (aplikasi online)
- (3) Disamping disiplin dan kinerja sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan reward kepada PNS yang menciptakan inovasi
- (4) Tambahan penghasilan diberikan kepada pegawai dipekerjakan di Pemerintah Kota Pariaman
- (5) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada:
 - a. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
 - b. PNS Pemerintah Kota Pariaman yang dipekerjakan atau yang diperbantukan kepada instansi lain;
 - c. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar;
 - d. PNS yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak berwajib Karena menjadi tersangka tindak pidana sampai putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. PNS yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Pegawai atau mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - f. Pegawai tenaga fungsional pengawas/guru yang mendapatkan Sertifikasi;
 - g. Pegawai yang masih menguasai aset milik pemerintah daerah baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak yang belum dikembalikan kepada Negara/Daerah.

Pasal 6

Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan kesanggupan PNS untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditekankan pada tingkat evaluasi hasil pekerjaan yang dapat terukur dan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 8

- (1) Presentase pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 5 :
 - a. Disiplin sebesar 40% (empat puluh per seratus).
 - b. Kinerja sebesar 60% (enam puluh per seratus).
- (2) Bagi PNS yang menciptakan inovasi diberikan *reward* sebesar 50% dari selisih nilai TPP dari pejabat setingkat diatasnya.

Pasal 9

Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

BAB V

TATA CARA PENGHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERSENTASE ASPEK DISIPLIN DAN KINERJA PEGAWAI

Pasal 10

Penghitungan tambahan penghasilan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dilakukan dengan cara mengalikan harga jabatan dengan indeks besaran rupiah dengan formula sebagai berikut :

$$TPP = Hj \times IDRp$$

Keterangan :

TPP : Tambahan Penghasilan Pegawai

Hj : Harga Jabatan

IDRp : Indeks besaran rupiah

Pasal 11

Nilai Indeks Besaran Rupiah (IDRp) setiap harga jabatan untuk jabatan struktural maupun jabatan pelaksana (Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu) sebesar Rp2.500,00 (*Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*).

Pasal 12

- (1) Persentase aspek disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 huruf a didasarkan atas 5 (lima) indikator, yaitu :
 - a. Absen Pagi (AP), bobot 5 % (lima persen), dengan formula sebagai berikut :

$$AP = (5\% \times TPP) \times \frac{(\text{jumlah absen pagi})}{(\text{hari kerja satu bulan})}$$

Adapun kriteria pemotongan untuk absen pagi pada huruf a yaitu sebagai berikut :

1. Keterlambatan sampai dengan 30 (tiga puluh) menit tanpa keterangan mendapat pemotongan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari persentase nilai absen pagi.
 2. Keterlambatan lebih dari 30 (tiga puluh) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit tanpa keterangan mendapat pemotongan sebesar 50% (lima puluh persen) dari persentase nilai absen pagi.
 3. Keterlambatan lebih dari 60 (enam puluh) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit tanpa keterangan mendapat pemotongan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari persentase nilai absen pagi.
 4. Keterlambatan lebih dari 90 (sembilan puluh) menit tanpa keterangan mendapat pemotongan sebesar 100% (seratus persen) dari persentase nilai absen pagi.
- b. Absen Pulang (APL), bobot 5 % (lima persen) dengan formula :

$$APL = (5\% \times (TPP)) \times \frac{\text{(jumlah absen pulang)}}{\text{(hari kerja satu bulan)}}$$

Adapun kriteria pemotongan untuk absen pulang pada huruf b yaitu sebagai berikut :

1. Pulang sebelum waktunya sampai dengan 30 (tiga puluh) menit tanpa keterangan yang sah mendapat pemotongan sebesar 25% dari persentase nilai absen pulang.
 2. Pulang sebelum waktunya lebih dari 30 (tiga puluh) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit tanpa keterangan yang sah mendapat pemotongan sebesar 50% dari persentase nilai absen pulang.
 3. Pulang sebelum waktunya lebih dari 60 (enam puluh) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit tanpa keterangan yang sah mendapat pemotongan sebesar 75% dari persentase nilai absen pulang.
 4. Pulang sebelum waktunya lebih dari 90 (sembilan puluh) menit tanpa keterangan yang sah mendapat pemotongan sebesar 100% dari persentase nilai absen pulang.
- c. Hadir Kerja (HK) didapat dari data kinerja PNS Per Hari, dengan bobot 10 % (sepuluh persen), dengan formula sebagai berikut :

$$HK=(10\% \times (TPP)) \times \frac{(\text{akumulasi jam kerja})}{(\text{efektif jam kerja} \times \text{hari kerja satu bulan})}$$

Adapun kriteria pembayaran pada huruf c yaitu sebagai berikut :

1. PNS Tidak melaksanakan kinerja harian maka untuk aspek Hadir kerja dinilai 0%/Hari.
 2. Melaksanakan kinerja harian sampai dengan 1 Jam/60 Menit untuk PNS yang bekerja 5 (lima) hari kerja atau 1 Jam/60 Menit untuk PNS yang bekerja selama 6 (enam) hari kerja mendapat TPP sebesar 20% dari nilai persentase hadir kerja.
 3. Melaksanakan kinerja harian lebih dari 1 Jam/60 Menit sampai dengan 2,5 Jam/150 Menit untuk PNS yang bekerja 5 (lima) hari kerja atau 1,5 Jam/90 Menit untuk PNS yang bekerja selama 6 (enam) hari kerja mendapat TPP sebesar 40% dari nilai persentase hadir kerja.
 4. Melaksanakan kinerja harian lebih dari 2,5 Jam/150 Menit sampai dengan 3,5 Jam/210 Menit untuk PNS yang bekerja 5 (lima) hari kerja atau 2,5 Jam/150 Menit untuk PNS yang bekerja selama 6 (enam) hari kerja mendapat TPP sebesar 60% dari nilai persentase hadir kerja.
 5. Melaksanakan kinerja harian lebih dari 2,5 Jam/210 Menit sampai dengan 4,5 Jam/270 Menit untuk PNS yang bekerja 5 (lima) hari kerja atau 3,5 Jam/210 Menit untuk PNS yang bekerja selama 6 (enam) hari kerja mendapat TPP sebesar 80% dari nilai persentase hadir kerja.
 6. Melaksanakan kinerja harian selama 5,5 Jam/330 Menit untuk PNS yang bekerja 5 (lima) hari kerja atau 4 Jam/240 Menit untuk PNS yang bekerja selama 6 (enam) hari kerja per minggu mendapat TPP sebesar 100% dari nilai persentase hadir kerja.
- d. Melaksanakan Apel gabungan /PHBN (peringatan hari besar nasional)/Senam/Wirid (APSW) Bulanan PNS memperoleh nilai TPP sebesar 5% dengan rumus :

$$APSW = (5\% \times (TPP)) \times \frac{(\text{PHBN}+\text{Wirid}+\text{Senam}+\text{Apel Gabungan})}{(\text{total kegiatan dalam satu bulan})}$$

- e. Tidak mendapat hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bobot 15 % (lima belas persen), dengan rincian sebagai berikut :

- Bobot 15 % (lima belas persen) jika tidak pernah

- mendapat hukuman disiplin dalam satu bulan;
 - Bobot 10 % (sepuluh persen) jika mendapat hukuman disiplin ringan dalam satu bulan;
 - Bobot 5 % (lima persen) jika mendapat hukuman disiplin sedang dalam satu bulan;
 - Bobot 0 % (nol persen) jika mendapat hukuman disiplin berat dalam satu bulan.
- (2) Persentase aspek kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 huruf b berdasarkan Laporan Harian Minimal 5,5 Jam atau 330 Menit/Hari untuk PNS yang masuk 5 (lima) hari kerja dan 4 Jam atau 240 Menit/hari Untuk PNS yang masuk 6 (enam) hari kerja, dan ini merupakan catatan realisasi pekerjaan harian, dengan perhitungan sbb:

$$\text{TPP kinerja} = (60\% \times (\text{TPP})) \times \frac{(\text{total aktifitas kerja satu bulan})}{(\text{hari kerja} \times \text{besar aktifitas kerja})}$$

- (3) Aspek Inovasi
- a. Penilaian Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c akan dilaksanakan oleh tim khusus yang menilai apakah temuan, ide ataupun gagasan yang dihasilkan khususnya oleh Unit Kerja/perangkat daerah dikategorikan sebagai inovasi sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.
 - b. Tim khusus untuk menilai hasil inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan walikota.
 - c. Kriteria inovasi yang dilakukan oleh Unit Kerja ditetapkan dalam peraturan Walikota.

Pasal 13

- (1) Setiap pegawai wajib membuat Laporan Kinerja Harian seperti tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Laporan kinerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikirim dan diverifikasi oleh atasan langsung setiap hari kerja.
- (3) Jika atasan langsung tidak dapat melakukan verifikasi atau penilaian laporan kinerja harian pegawai dengan alasan tertentu, maka penilai disampaikan kepada atasan langsung pejabat penilai atau Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat daerah.
- (4) Penilaian atas laporan kinerja Asisten, Staf Ahli dan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Penilaian atas laporan kinerja Sekretaris Daerah dilakukan secara *Self Assesment*.

Pasal 14

- (1) PNS yang tidak masuk kerja dengan alasan sakit, izin dan cuti (tahunan, melahirkan, alasan penting) yang dibuktikan dengan dokumen yang sah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan surat keterangan dari pimpinan OPD diberikan TPP sesuai dengan besaran persentase disiplin.
- (2) PNS yang melaksanakan tugas kedinasan tidak dikenakan aspek disiplin dan aspek kinerja.
- (3) Tugas kedinasan diluar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan dengan surat perintah melaksanakan tugas kedinasan.

BAB VI

HARI, JAM KERJA DAN PENGELOLAAN DATA

Bagian Kesatu

Hari dan Jam Kerja

Pasal 15

- (1) Ketentuan waktu kerja pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman untuk PNS 5 (lima) hari kerja sebagai berikut :
 - a. hari Senin sampai dengan Hari Kamis waktu kerja dimulai dari Pukul 07.30 WIB sampai dengan Pukul 16.00 WIB; dan
 - b. hari Jumat waktu kerja dimulai dari Pukul 07.30 WIB sampai dengan Pukul 16.30 WIB.
- (2) Ketentuan waktu kerja pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman untuk PNS 6 (enam) hari kerja sebagai berikut :
 - a. hari Senin sampai dengan Hari Kamis waktu kerja dimulai dari Pukul 07.30 WIB sampai dengan Pukul 14.00 WIB; dan
 - b. hari Jumat waktu kerja dimulai dari Pukul 07.30 WIB sampai dengan Pukul 12.00 WIB.
 - c. Hari Sabtu waktu kerja dimulai dari Pukul 07.30 WIB sampai dengan Pukul 13.00 WIB.
- (3) Ketentuan waktu kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada saat bulan puasa (bulan suci ramadhan), cuti bersama dan ketentuan lainnya yang akan diatur lebih lanjut dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan waktu kerja dan khusus untuk Perangkat Daerah pelayanan publik yang menerapkan shift atau penugasan kerja khusus diatur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah, dengan ketentuan jumlah jam kerja tidak boleh kurang dari 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam seminggu.

- (5) Untuk Aspek Disiplin PNS yang melaksanakan kegiatan Upacara Bendera/Senam/Wirid Bulanan PNS maka batas waktu pengambilan absen paling lambat jam 10.00 WIB di Unit Kerja PNS yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Data
Pasal 16

- (1) Dalam pengelolaan data kehadiran pegawai, Unit Kerja/Perangkat Daerah berwenang:
- a. menyusun rekapitulasi kehadiran pegawai setiap bulan dan disampaikan kepada Tim Verifikasi yang dikoordinasi oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) paling lambat tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya untuk diverifikasi;
 - b. hasil verifikasi dari Tim Verifikasi atas data kehadiran dikembalikan pada Perangkat Daerah/Unit kerja Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) hari setelah hasil verifikasi diterima; dan
 - c. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap monitoring dan pengelolaan data kehadiran pegawainya.
- (2) Dalam pengelolaan data kehadiran pegawai, Tim Verifikasi memiliki tugas dan kewenangan:
- a. melakukan verifikasi atas rekapitulasi kehadiran yang disampaikan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
 - b. menggunakan data kehadiran pegawai yang diinput oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah untuk kepentingan pembinaan kepegawaian; dan
 - c. memfasilitasi pengolahan data kehadiran Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah jika terjadi permasalahan data.

Pasal 17

Pengelolaan data TPP berbasis elektronik pada Perangkat daerah dilaksanakan oleh satuan kerja yang menangani urusan bidang kepegawaian.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 18

- (1) Dalam rangka pelaksanaan verifikasi terhadap hasil pengukuran kinerja, dan menandatangani pengaduan dari pegawai yang dinilai maupun Pejabat yang menilai, dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi.

- (2) Keanggotaan Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman;
 - b. Inspektorat Daerah Kota Pariaman;
 - c. Perangkat Daerah yang menangani urusan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - d. Masing-masing Perangkat Daerah yang menangani urusan Kepegawaian.

BAB VIII
SANKSI
Pasal 19

- (1) Pejabat penilai yang berdasarkan hasil verifikasi Tim Monitoring dan Evaluasi terbukti memberikan penilaian kinerja yang tidak sesuai dengan bukti kinerja pegawai-diberikan sanksi berupa pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total tambahan penghasilan pada bulan berikutnya.
- (2) Pejabat Penilai yang terbukti tidak melakukan penilaian kinerja pegawai kepada bawahannya, diberikan sanksi berupa pemotongan tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari total TPP pada bulan berikutnya.
- (3) Kepada setiap pegawai yang aktif dan tidak melaksanakan ketentuan yang diisyaratkan dalam aspek penilaian untuk mendapatkan tambahan penghasilan selama 2 (dua) bulan berturut-turut, maka otomatis penerimaan tambahan penghasilannya untuk bulan berikutnya dan seterusnya tidak dapat dibayarkan, kecuali pegawai yang bersangkutan telah melaksanakan kembali ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 20

- (1) TPP dibayar sebanyak 14 (empat belas) kali setiap tahun.
- (2) Permintaan pembayaran uang TPP diajukan pada bulan berikutnya paling lambat pada setiap tanggal 10 (sepuluh), kecuali untuk bulan Desember dapat diajukan pada bulan berjalan.
- (3) Tata cara permintaan pembayaran uang TPP ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pejabat penanggung jawab mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) melalui Bendahara Pengeluaran dari masing-masing Perangkat Daerah.
 - b. surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dilampiri dengan;

1. daftar Perhitungan Uang TPP yang telah disahkan Pejabat Penanggung Jawab/Kepala Perangkat Daerah;
 2. daftar Rekap Kehadiran Pegawai bulanan;
 3. daftar Rekap Kinerja Pegawai bulanan;
 4. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- (4) Daftar perhitungan uang TPP untuk Pejabat Eselon II pada Sekretariat Daerah disahkan oleh Sekretaris Daerah, sedangkan Daftar perhitungan uang TPP untuk Perangkat Daerah disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kepala Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 21

TPP dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah berikut perubahannya.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 22

- (1) PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas diberikan Tambahan Penghasilan sesuai dengan beban kerja yang lebih berat dan/atau *grade*/kelas jabatan yang lebih tinggi.
- (2) Harga Jabatan yang merupakan faktor tambahan untuk melengkapi beban kerja bagi pejabat struktural (jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas) merupakan satu kesatuan dari bobot (poin/*grade*/kelas) jabatan, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Harga Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan faktor pengali untuk tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja atau bobot kerja (nilai/*grade*/kelas) jabatan bagi pejabat struktural (jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas) maupun jabatan Pelaksana (fungsional umum dan fungsional tertentu).
- (4) Bagi Tenaga Guru untuk pembayaran TPP disesuaikan dengan Surat Keputusan Penerima Tunjangan Sertifikasi dari Dirjen Kemendikbud.

Pasal 23

- (1) Khusus bagi PNS yang meninggal dunia, diberikan tambahan penghasilan secara penuh pada bulan berkenaan.

(2) Tambahan Penghasilan bagi PNS yang meninggal dunia diberikan kepada ahli waris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 25 Februari 2019

WALIKOTA PARIAMAN,

d.t.o

GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 25 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

d.t.o

INDRA SAKTI

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2019 NOMOR 8

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 8 TAHUN 2019
 TANGGAL : 23 JANUARI 2019
 TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH
 KOTA PARIAMAN

EVALUASI JABATAN PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

I. NILAI HARGA JABATAN SRUKTURAL.

NO	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	HARGA JABATAN
1	2	3	4	5
SEKRETARIAT DAERAH				
1	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pariaman	15	3.555
2	Asisten Administrasi Pemerintahan Umum	Sekretariat Daerah Kota Pariaman	14	3.030
3	Asisten Perekonomian	Sekretariat Daerah Kota Pariaman	14	3.030
BAGIAN PEMERINTAHAN				
4	Kepala Bagian Pemerintahan	Sekretariat Daerah Kota Pariaman	12	2.315
5	Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan	Sekretariat Daerah Kota Pariaman	9	1.430
6	Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pariaman	9	1.430
7	Kepala Sub Bagian Perbatasan dan Kerjasama Daerah	Sekretariat Daerah Kota Pariaman	9	1.430
BAGIAN HUKUM DAN HAM				
8	Kepala Bagian Hukum dan HAM	Sekretariat Daerah Kota Pariaman	12	2.315
9	Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan	Sekretariat Daerah Kota Pariaman	9	1.430
10	Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum	Sekretariat Daerah Kota Pariaman	9	1.430
11	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM	Sekretariat Daerah Kota Pariaman	9	1.430
BAGIAN ORGANISASI DAN APARATUR				
12	Kepala Bagian Organisasi dan Aparatur	Sekretariat Daerah Kota Pariaman	12	2.315
13	Kepala Sub Bagian Kelembagaan	Sekretariat Daerah Kota Pariaman	9	1.430
14	Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan	Sekretariat Daerah Kota Pariaman	9	1.430
15	Kepala Sub Bagian Anforjab dan Kepegawaian	Sekretariat Daerah Kota Pariaman	9	1.430
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
16	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah Kota Pariaman	12	2.315
17	Kepala Sub Bagian Kepemudaan	Sekretariat Daerah Kota Pariaman	8	1.295
18	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial	Sekretariat Daerah Kota Pariaman	9	1.430
19	Kepala Sub Bagian Agama dan Pendidikan	Sekretariat Daerah Kota Pariaman	8	1.295
BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN		- 15 -		

20	Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan	Sekretariat Daerah Kota Pariaman	12	2.315
21	Kepala Sub Bagian Perekonomian	Sekretariat Daerah Kota Pariaman	9	1.430
22	Kepala Sub Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan	Sekretariat Daerah Kota Pariaman	9	1.430
23	Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah Kota Pariaman	9	1.430
BAGIAN UMUM DAN PROTOKOLER				
24	Kepala Bagian Umum dan Protokoler	Sekretariat Daerah Kota Pariaman	12	2.315
25	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Sekretariat Daerah Kota Pariaman	9	1.430
26	Kepala Sub Bagian Protokoler	Sekretariat Daerah Kota Pariaman	9	1.430
27	Kepala Sub Bagian Keuangan	Sekretariat Daerah Kota Pariaman	9	1.430
BAGIAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN				
28	Kepala Bagian Kearsipan dan Perpustakaan	Sekretariat Daerah Kota Pariaman	12	2.315
29	Kepala Sub Bagian Kearsipan	Sekretariat Daerah Kota Pariaman	9	1.430
30	Kepala Sub Bagian Pengembangan Perpustakaan	Sekretariat Daerah Kota Pariaman	8	1.295
31	Kepala Sub Bagian Layanan Perpustakaan	Sekretariat Daerah Kota Pariaman	9	1.430
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				
32	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman	14	2.865
KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN				
33	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman	11	2.090
34	Kepala Sub Bagian Umum	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman	9	1.430
35	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman	9	1.430
KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN				
36	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman	11	2.090
37	Kepala Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman	9	1.430
38	Kepala Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Publikasi	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman	9	1.430
KEPALA BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN				
39	Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman	11	2.090
40	Kepala Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman	9	1.430
41	Kepala Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman	9	1.430
INSPEKTORAT				
42	Inspektur	Inspektorat	14	3.030
43	Inspektur Pembantu Wilayah I	Inspektorat	11	1.990
44	Inspektur Pembantu Wilayah II	Inspektorat	11	1.990
45	Inspektur Pembantu Wilayah III	Inspektorat	11	1.990
SEKRETARIAT INSPEKTORAT				
46	Sekretaris Inspektorat	Inspektorat	12	2.140
47	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Inspektorat	9	1.430
48	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	Inspektorat	9	1.430
DINAS PENDIDIKAN				

49	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	14	2.865
SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA				
50	Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	12	2.115
51	Kepala Sub Bagian Umum dan Program	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	9	1.430
52	Kepala Sub Bagian Keuangan	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	9	1.430
53	Kepala Bidang Pendidikan Pembinaan Anak Usia Dini Non Formal	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	11	2.045
54	Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	9	1.430
55	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	9	1.430
56	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	9	1.430
BIDANG PENDIDIKAN DASAR				
57	Kepala Bidang Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	11	2.045
58	Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	9	1.430
59	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	9	1.430
60	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	9	1.430
BIDANG PEMUDA DAN OLAH RAGA				
61	Kepala Bidang Pemuda dan Olah Raga	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	11	2.045
62	Kepala Seksi Olah Raga	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	9	1.430
63	Kepala Seksi Pemuda	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	8	1.295
64	Kepala Seksi Penghargaan dan Prestasi	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	9	1.430
DINAS KESEHATAN				
65	Kepala Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	14	2.865
SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN				
66	Sekretaris Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	12	2.115
67	Kepala Sub Bagian Umum dan Program	Dinas Kesehatan	9	1.430
68	Kepala Sub Bagian Keuangan	Dinas Kesehatan	9	1.430
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN				
69	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	Dinas Kesehatan	11	2.045
70	Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT	Dinas Kesehatan	9	1.430
71	Kepala Seksi Sumber Daya Kesehatan	Dinas Kesehatan	9	1.430
72	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	9	1.430
BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT				
73	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Dinas Kesehatan	11	2.045
74	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Dinas Kesehatan	9	1.430
75	Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi	Dinas Kesehatan	9	1.430
76	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	Dinas Kesehatan	9	1.430
BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DAN PROMOSI KESEHATAN				

77	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan	11	2.045
78	Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan	9	1.430
79	Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Dinas Kesehatan	9	1.430
80	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	Dinas Kesehatan	9	1.430
UPTD INSTALASI FARMASI				
81	Kepala UPTD Instalasi Farmasi	Dinas Kesehatan	9	1.430
82	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Kesehatan	8	1.295
1. UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PARIAMAN				
83	Kepala Puskesmas	Dinas Kesehatan	9	1.430
84	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas Pariaman	Dinas Kesehatan	8	1.295
2. UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KURAI TAJI				
85	Kepala Puskesmas	Dinas Kesehatan	9	1.430
86	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas Kurai Taji	Dinas Kesehatan	8	1.295
3. UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MARUNGGI				
87	Kepala Puskesmas	Dinas Kesehatan	9	1.430
88	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas Marunggi	Dinas Kesehatan	8	1.295
4. UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AIR SANTOK				
89	Kepala Puskesmas	Dinas Kesehatan	9	1.430
90	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas Air Santok	Dinas Kesehatan	8	1.295
5. UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SIKAPAK				
91	Kepala Puskesmas	Dinas Kesehatan	9	1.430
92	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas Sikapak	Dinas Kesehatan	8	1.295
6. UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KAMPUNG BARU PADUSUNAN				
93	Kepala Puskesmas	Dinas Kesehatan	9	1.430
94	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas Kampung Baru Padusunan	Dinas Kesehatan	8	1.295
7. UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT NARAS				
95	Kepala Puskesmas	Dinas Kesehatan	9	1.430
96	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas Naras	Dinas Kesehatan	8	1.295
<i>DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN</i>				
97	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	14	2.865
SEKRETARIAT DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN				
98	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	12	2.115
99	Kepala Sub Bagian Umum dan Program	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	8	1.295
100	Kepala Sub Bagian Keuangan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	9	1.430
BIDANG BINA MARGA				
101	Kepala Bidang Bina Marga	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	11	2.045
102	Kepala Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	8	1.295

103	Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	9	1.430
BIDANG PENGAIRAN				
104	Kepala Bidang Pengairan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	11	2.045
105	Kepala Seksi Irigasi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	9	1.430
106	Kepala Seksi Pengelolaan Sungai dan Pantai	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	9	1.430
BIDANG TATA RUANG DAN PENATAAN BANGUNAN				
107	Kepala Bidang Tata Ruang Tata Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	11	2.045
108	Kepala Seksi Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	9	1.430
109	Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	9	1.430
BIDANG PERTANAHAN				
110	Kepala Bidang Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	11	2.045
111	Kepala Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	8	1.295
112	Kepala Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	9	1.430
UPTD PERALATAN DAN PERBEKALAN SERTA PENERANGAN JALAN UMUM				
113	Kepala UPTD Peralatan dan Perbekalan serta Penerangan Jalan Umum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	9	1.430
114	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Peralatan dan Perbekalan serta Penerangan Jalan Umum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	8	1.295
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				
115	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan hidup	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan hidup	14	2.865
SEKRETARIAT DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				
116	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan hidup	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan hidup	12	2.115
117	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan hidup	9	1.430
118	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan hidup	9	1.430
	Kepala Sub Bagian Keuangan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan hidup	9	1.430
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
120	Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan hidup	11	2.045
121	Kepala Seksi Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan hidup	9	1.430

122	Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan hidup	9	1.430
BIDANG PENATAAN DAN PENAATAN PPLH				
123	Kepala Bidang Penataan dan Penaatan PPLH	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan hidup	11	2.045
124	Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan hidup	9	1.430
125	Kepala Seksi Pengawasan dan Penataan Hukum Lingkungan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan hidup	9	1.430
BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN				
126	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan hidup	11	2.045
127	Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan hidup	9	1.430
128	Kepala Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan hidup	9	1.430
BIDANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN				
129	Kepala Bidang Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan hidup	11	2.045
130	Kepala Seksi Pengelolaan Pertamanan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan hidup	9	1.430
131	Kepala Seksi Pengelolaan Kebersihan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan hidup	9	1.430
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN				
132	Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan hidup	9	1.430
133	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Lingkungan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan hidup	8	1.295
UPTD AIR BERSIH				
134	Kepala UPTD Air Bersih	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan hidup	9	1.430
135	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan hidup	8	1.295
<i>DINAS SOSIAL</i>				
136	Kepala Dinas Sosial	Dinas Sosial	14	2.865
SEKRETARIAT DINAS SOSIAL				
137	Sekretaris Dinas Sosial	Dinas Sosial	12	2.115
138	Kepala Sub Bagian Umum dan Program	Dinas Sosial	9	1.430
139	Kepala Sub Bagian Keuangan	Dinas Sosial	9	1.430
BIDANG REHABILITASI DAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL				
140	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial	Dinas Sosial	11	2.045
141	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia	Dinas Sosial	9	1.430
142	Kepala Seksi Sosial, Tuna Sosial dan Korban Napza	Dinas Sosial	8	1.295
143	Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial	8	1.295

BIDANG PEMBINAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN				
144	Kepala Bidang Pembinaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Dinas Sosial	11	2.045
145	Kepala Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas	Dinas Sosial	8	1.295
146	Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial	9	1.430
147	Kepala Seksi Kelembagaan Kepahlawanan dan Restorasi Sosial	Dinas Sosial	8	1.295
<i>DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA</i>				
148	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	14	2.865
SEKRETARIAT DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA				
149	Sekretaris Penanaman Modal, Pelayana Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	12	2.115
150	Kepala Sub Bagian Umum dan Program	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	9	1.430
151	Kepala Sub Bagian Keuangan	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	9	1.430
BIDANG PENANAMAN MODAL				
152	Kepala Bidang Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	11	2.045
153	Kepala Seksi Perencanaan dan Promosi	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	9	1.430
154	Kepala Seksi Fasilitasi, Kerjasama dan Pengendalian	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	9	1.430
BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
155	Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	11	2.045
156	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	9	1.430
157	Kepala Seksi Pengawasan Perizinan dan Pengaduan	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	8	1.295
BIDANG TENAGA KERJA				
158	Kepala Bidang Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	11	2.045
159	Kepala Seksi Pelatihan, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	9	1.430
160	Kepala Seksi Pengawasan, Hubungan Industrial dan Jamsostek	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	8	1.295
<i>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA</i>				
161	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	14	2.865
SEKRETARIAT DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA				
162	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	12	2.115

163	Kepala Sub Bagian Umum dan Program	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	9	1.430
164	Kepala Sub Bagian Keuangan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	9	1.430
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
165	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	11	2.045
166	Kepala Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	8	1.295
167	Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender dan Kualitas Hidup Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	9	1.430
168	Kepala Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	8	1.295
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
169	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	11	2.045
170	Kepala Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	9	1.430
171	Kepala Seksi Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	8	1.295
172	Kepala Seksi Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	9	1.430
DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN				
173	Kepala Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan	Dinas Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan	14	2.865
SEKRETARIAT PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN				
174	Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan	Dinas Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan	12	2.115
175	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan	9	1.430
176	Kepala Sub Bagian Program dan Perencanaan	Dinas Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan	9	1.430
177	Kepala Sub Bagian Keuangan	Dinas Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan	9	1.430
BIDANG TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN				
178	Kepala Bidang Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Dinas Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan	11	2.045
179	Kepala Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dinas Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan	9	1.430
180	Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana	Dinas Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan	9	1.430
181	Kepala Seksi Perkebunan	Dinas Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan	9	1.430
BIDANG KETAHANAN PANGAN				
182	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	Dinas Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan	11	2.045
183	Kepala Seksi Ketersediaan Ketahanan Pangan	Dinas Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan	9	1.430
184	Kepala Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan	Dinas Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan	9	1.430
185	Kepala Seksi Penganekaragaman konsumsi dan Keamanan Pangan	Dinas Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan	9	1.430

BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN				
186	Kepala Bidang Perikanan Dan Kelautan	Dinas Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan	11	2.045
187	Kepala Seksi Perikanan Tangkap	Dinas Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan	9	1.430
188	Kepala Seksi Perikanan Budidaya	Dinas Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan	9	1.430
189	Kepala Seksi Penguatan Daya Saing	Dinas Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan	9	1.430
BIDANG PETERNAKAN DAN KESWAN				
190	Kepala Bidang Perternakan dan Keswan	Dinas Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan	11	2.045
191	Kepala Seksi Pembibitan dan Produksi	Dinas Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan	9	1.430
192	Kepala Seksi Kesehatan Hewan	Dinas Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan	8	1.295
193	Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pemasaran hasil	Dinas Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan	9	1.430
UPTD BALAI PENYULUHAN PERTANIAN				
194	Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian	Dinas Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan	9	1.430
195	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian	Dinas Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan	8	1.295
UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN DAN INSEMINASI BUATAN				
196	Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan	Dinas Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan	9	1.430
197	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan	Dinas Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan	8	1.295
UPTD BALAI BENIH IKAN				
198	Kepala UPTD Balai Benih Ikan	Dinas Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan	9	1.430
199	Kepala Tata Usaha UPTD Balai Benih Ikan	Dinas Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan	8	1.295
<i>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</i>				
200	Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	14	2.865
SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
201	Sekretaris Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	12	2.115
202	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	9	1.430
203	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	9	1.430
BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				
204	Kepala Bidang Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	11	2.045
205	Kepala Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	9	1.430
206	Kepala Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	9	1.430
207	Kepala Seksi Pendokumentasian Dokumen Kependudukan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	9	1.430
BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA				
208	Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	11	2.045
209	Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	8	1.295
210	Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	9	1.430
211	Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	9	1.430

<i>DINAS PERHUBUNGAN</i>				
212	Kepala Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	14	2.865
<i>SEKRETARIAT DINAS PERHUBUNGAN</i>				
213	Sekretaris Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	12	2.115
214	Kepala Sub Bagian Umum dan Program	Dinas Perhubungan	9	1.430
215	Kepala Sub Bagian Keuangan	Dinas Perhubungan	9	1.430
<i>BIDANG ANGKUTAN</i>				
216	Kepala Bidang Angkutan	Dinas Perhubungan	11	2.045
217	Kepala Seksi Angkutan Darat dan Perkereta Apian	Dinas Perhubungan	9	1.430
218	Kepala Seksi Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran	Dinas Perhubungan	8	1.295
219	Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	Dinas Perhubungan	8	1.295
<i>BIDANG TEKNIK SARANA DAN KESELAMATAN ANGKUTAN DARAT</i>				
220	Kepala Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan Angkutan Darat	Dinas Perhubungan	11	2.045
221	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana	Dinas Perhubungan	8	1.295
222	Kepala Seksi Pengendalian Operasional LLAJ	Dinas Perhubungan	9	1.430
223	Kepala Seksi Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas	Dinas Perhubungan	9	1.430
<i>UPTD PERPARKIRAN</i>				
224	Kepala UPTD Perpajakan	Dinas Perhubungan	9	1.430
225	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Perhubungan	8	1.295
<i>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</i>				
226	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika	Dinas Komunikasi Dan Informatika	14	2.865
<i>SEKRETARIAT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</i>				
227	Sekretaris Dinas Komunikasi Dan Informatika	Dinas Komunikasi Dan Informatika	12	2.115
228	Kepala Sub Bagian Umum dan Program	Dinas Komunikasi Dan Informatika	9	1.430
229	Kepala Sub Bagian Keuangan	Dinas Komunikasi Dan Informatika	9	1.430
<i>BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT</i>				
230	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government	Dinas Komunikasi Dan Informatika	11	2.045
231	Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi	Dinas Komunikasi Dan Informatika	8	1.295
232	Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi	Dinas Komunikasi Dan Informatika	9	1.430
233	Kepala Seksi Layanan E-Government	Dinas Komunikasi Dan Informatika	9	1.430
<i>BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</i>				
234	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi Dan Informatika	11	2.045
235	Kepala Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media	Dinas Komunikasi Dan Informatika	8	1.295
236	Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi Dan Informatika	9	1.430
237	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Komunikasi Dan Informatika	9	1.430
<i>DINAS PERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN DAN KUKM</i>				
238	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan KUKM	Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan KUKM	14	2.865

SEKRETARIAT DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KUKM				
239	Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan KUKM	Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan KUKM	12	2.115
240	Kepala Sub Bagian Umum dan Program	Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan KUKM	9	1.430
241	Kepala Sub Bagian Keuangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan KUKM	9	1.430
BIDANG PERINDUSTRIAN				
242	Kepala Bidang Perindustrian	Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan KUKM	11	2.045
243	Kepala Seksi Pembinaan, Pengembangan Industri Agro dan Hasil Laut	Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan KUKM	9	1.430
244	Kepala Seksi Pembinaan, Pengembangan Industri Non Agro	Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan KUKM	9	1.430
BIDANG PERDAGANGAN				
245	Kepala Bidang Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan KUKM	11	2.045
246	Kepala Seksi Usaha dan Perlindungan Konsumen	Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan KUKM	9	1.430
247	Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran	Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan KUKM	9	1.430
BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH				
248	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan KUKM	11	2.045
249	Kepala Seksi Kelembagaan dan Bina Usaha Koperasi	Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan KUKM	9	1.430
250	Kepala Seksi Pembiayaan dan Pemberdayaan KUMKM	Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan KUKM	9	1.430
UPTD METROLOGI LEGAL				
251	Kepala UPTD Metrologi Legal	Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan KUKM	9	1.430
252	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Metrologi Legal	Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan KUKM	8	1.295
UPTD PASAR PARIAMAN				
253	Kepala UPTD Pasar Pariaman	Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan KUKM	9	1.430
254	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pasar Pariaman	Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan KUKM	8	1.295
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				
255	Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	14	2.865
SEKRETARIAT DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				
256	Sekretaris Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	12	2.115
257	Kepala Sub Bagian Umum dan Program	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	9	1.430
258	Kepala Sub Bagian Keuangan	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	9	1.430
BIDANG PROMOSI DAN KERJASAMA				
259	Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	11	2.045
260	Kepala Seksi Promosi	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	9	1.430
261	Kepala Seksi Kerjasama Pariwisata	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	9	1.430
BIDANG SENI DAN BUDAYA				
262	Kepala Bidang Seni dan Budaya	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	11	2.045
263	Kepala Seksi Pengelolaan Seni Budaya	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	9	1.430
264	Kepala Seksi Sejarah, Tradisi dan Kesenian	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	9	1.430

BIDANG DESTINASI DAN DAYA TARIK WISATA				
265	Kepala Bidang Destinasi dan Daya Tarik Wisata	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	11	2.045
266	Kepala Seksi Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	9	1.430
267	Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kerjasama dan Investasi Pariwisata	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	9	1.430
<i>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</i>				
268	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	14	2.865
SEKRETARIAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
269	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	12	2.115
270	Kepala Sub Bagian Umum dan Program	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	9	1.430
271	Kepala Sub Bagian Keuangan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	9	1.430
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
272	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	11	2.045
273	Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	8	1.295
274	Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Teknologi Tepat Guna	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	8	1.295
275	Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	9	1.430
BIDANG PEMERINTAHAN DESA				
276	Kepala Bidang Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	11	2.045
277	Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	8	1.295
278	Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	8	1.295
279	Kepala Seksi Pembinaan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	9	1.430
<i>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN</i>				
280	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	14	2.865
SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN				
281	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	12	2.115
282	Kepala Sub Bagian Umum dan Program	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	9	1.430
283	Kepala Sub Bagian Keuangan	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	9	1.430
BIDANG KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM, PEMADAM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
284	Kepala Bidang Ketentraman Ketertiban Umum, Pemadam dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	11	2.045
285	Kepala Seksi Pemadam Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	9	1.430
286	Kepala Seksi Operasional	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	9	1.430
287	Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	9	1.430

BIDANG PPUD DAN PENINGKATAN SDM				
288	Kepala Bidang PPUD dan Peningkatan SDM	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	11	2.045
289	Kepala Seksi Penyidik	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	9	1.430
290	Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	9	1.430
291	Kepala Seksi Pengawasan, Pembinaan dan Penyuluhan	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	9	1.455
<i>BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</i>				
292	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	14	3.030
SEKRETARIAT BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
293	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan , Penelitian Dan Pengembangan Daerah	12	2.140
294	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Badan Perencanaan , Penelitian Dan Pengembangan Daerah	9	1.430
295	Kepala Sub Bagian Keuangan	Badan Perencanaan , Penelitian Dan Pengembangan Daerah	9	1.430
296	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program	Badan Perencanaan , Penelitian Dan Pengembangan Daerah	9	1.430
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAB EVALUASI PELAPORAN				
297	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dan Evaluasi Pelaporan	Badan Perencanaan , Penelitian Dan Pengembangan Daerah	11	2.045
298	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan , Penelitian Dan Pengembangan Daerah	9	1.430
299	Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan	Badan Perencanaan , Penelitian Dan Pengembangan Daerah	8	1.295
BIDANG EKONOMI				
300	Kepala Bidang Ekonomi	Badan Perencanaan , Penelitian Dan Pengembangan Daerah	11	2.045
301	Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Pariwisata	Badan Perencanaan , Penelitian Dan Pengembangan Daerah	8	1.295
302	Kepala Sub Bidang Pertanian dan Perikanan	Badan Perencanaan , Penelitian Dan Pengembangan Daerah	9	1.430
BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA				
303	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Badan Perencanaan , Penelitian Dan Pengembangan Daerah	11	2.045
304	Kepala Sub Bidang Pemerintahan	Badan Perencanaan , Penelitian Dan Pengembangan Daerah	9	1.430
305	Kepala Sub Bidang Sosial Budaya	Badan Perencanaan , Penelitian Dan Pengembangan Daerah	8	1.295
BIDANG SARANA DAN PRASARANA WILAYAH				
306	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah	Badan Perencanaan , Penelitian Dan Pengembangan Daerah	11	2.045
307	Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang	Badan Perencanaan , Penelitian Dan Pengembangan Daerah	9	1.430
308	Kepala Sub Bidang Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Badan Perencanaan , Penelitian Dan Pengembangan Daerah	9	1.430
<i>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH</i>				
309	Kepala Badan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	14	3.030
SEKRETARIAT BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH				
310	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	12	2.140
311	Kepala Sub Bagian Umum dan Program	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	9	1.430
312	Kepala Sub Bagian Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	9	1.430

BIDANG ANGGARAN				
313	Kepala Bidang Anggaran	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	11	2.045
314	Kepala Seksi Penyusunan Anggaran	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	9	1.430
315	Kepala Seksi Administrasi Anggaran	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	9	1.430
BIDANG PERBENDAHARAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN				
325	Kepala Bidang Perbendaharaan. Akutansi dan Pelaporan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	11	2.045
326	Kepala Seksi Penerimaan dan Pengeluaran Dana	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	9	1.430
327	Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	9	1.430
BIDANG BARANG MILIK DAERAH (ASET)				
319	Kepala Bidang Barang Milik Daerah (Aset)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	11	2.045
320	Kepala Seksi Penatausahaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	9	1.430
321	Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	9	1.430
BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI PENDAPATAN				
316	Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	11	2.045
317	Kepala Seksi Pendataan Pengolahan Data dan Penetapan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	9	1.430
318	Kepala Seksi Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	9	1.430
BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN				
322	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	11	2.045
323	Kepala Seksi Penerimaan dan Pendapatan Lainnya	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	9	1.430
324	Kepala Seksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	9	1.430
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
328	Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14	2.865
SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
329	Sekretaris Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12	2.115
330	Kepala Sub Bagian Umum dan Program	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9	1.430
331	Kepala Sub Bagian Keuangan	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9	1.430
BIDANG PENGEMBANGAN SDM DAN PEMBINAAN APARATUR				
332	Kepala Bidang Pengembangan SDM dan Pembinaan Aparatur	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11	2.045
333	Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Disiplin Aparatur	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9	1.430
334	Kepala Sub Bidang Pengembangan Karier	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9	1.430
335	Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9	1.430

BIDANG MUTASI DAN INFORMASI				
336	Kepala Bidang Mutasi dan Informasi	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11	2.045
337	Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pensiun	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9	1.430
338	Kepala Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9	1.430
339	Kepala Sub Bidang Data dan Informasi	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9	1.430
<i>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</i>				
340	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14	2.865
SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
341	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12	2.115
342	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9	1.430
343	Kepala Sub Bagian Keuangan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9	1.430
343	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9	1.430
BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN				
344	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11	2.045
345	Kepala Seksi Pencegahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9	1.430
346	Kepala Seksi Kesiapsiagaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9	1.430
BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK				
347	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11	2.045
348	Kepala Seksi Identifikasi , Pendataan dan Pemulihan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9	1.430
349	Kepala Seksi Penyelamatan, Evakuasi dan Pelayanan Korban Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9	1.430
BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI				
350	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11	2.045
351	Kepala Seksi Rehabilitasi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9	1.430
352	Kepala Seksi Rekonstruksi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9	1.430
<i>KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</i>				
353	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	13	2.415
354	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	9	1.430
355	Kepala Seksi Kesatuan Bangsa	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	8	1.295
356	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	8	1.295
357	Kepala Seksi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	8	1.295
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SADIKIN				
BAGIAN TATA USAHA				
358	Kepala RSUD dr. Sadikin	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sadikin	9	1.430
359	Kepala Bagian Tata Usaha	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sadikin	8	1.295

<i>1. KECAMATAN PARIAMAN SELATAN</i>				
360	Camat	Kecamatan Pariaman Selatan	12	2.315
361	Sekretaris Camat	Kecamatan Pariaman Selatan	11	2.090
362	Kepala Sub Bagian Umum dan Program	Kecamatan Pariaman Selatan	9	1.430
363	Kepala Sub Bagian Keuangan	Kecamatan Pariaman Selatan	9	1.430
364	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Pariaman Selatan	8	1.295
365	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Kecamatan Pariaman Selatan	9	1.430
366	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Pariaman Selatan	9	1.430
367	Kepala Seksi Pemerintahan	Kecamatan Pariaman Selatan	9	1.430
<i>2. KECAMATAN PARIAMAN TIMUR</i>				
368	Camat	Kecamatan Pariaman Timur	12	2.315
369	Sekretaris Camat	Kecamatan Pariaman Timur	11	2.090
370	Kepala Sub Bagian Umum dan Program	Kecamatan Pariaman Timur	9	1.430
371	Kepala Sub Bagian Keuangan	Kecamatan Pariaman Timur	9	1.430
372	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Pariaman Timur	9	1.430
373	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Kecamatan Pariaman Timur	9	1.430
374	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Pariaman Timur	8	1.295
375	Kepala Seksi Pemerintahan	Kecamatan Pariaman Timur	9	1.430
<i>3. KECAMATAN PARIAMAN UTARA</i>				
376	Camat	Kecamatan Pariaman Utara	12	2.315
377	Sekretaris Camat	Kecamatan Pariaman Utara	11	2.090
378	Kepala Sub Bagian Umum dan Program	Kecamatan Pariaman Utara	8	1.295
379	Kepala Sub Bagian Keuangan	Kecamatan Pariaman Utara	9	1.430
380	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Pariaman Utara	8	1.295
381	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Kecamatan Pariaman Utara	8	1.295
382	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Pariaman Utara	9	1.430
383	Kepala Seksi Pemerintahan	Kecamatan Pariaman Utara	9	1.430
<i>4. KECAMATAN PARIAMAN TENGAH</i>				
384	Camat	Kecamatan Pariaman Tengah	12	2.315
385	Sekretaris Camat	Kecamatan Pariaman Tengah	11	2.090
386	Kepala Sub Bagian Umum dan Program	Kecamatan Pariaman Tengah	9	1.430
387	Kepala Sub Bagian Keuangan	Kecamatan Pariaman Tengah	9	1.430
388	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kecamatan Pariaman Tengah	9	1.430
389	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Kecamatan Pariaman Tengah	8	1.295
390	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Kecamatan Pariaman Tengah	8	1.295
391	Kepala Seksi Pemerintahan	Kecamatan Pariaman Tengah	9	1.430
<i>1. KELURAHAN JATI HILIR</i>				
392	Lurah Jati Hilir	Kecamatan Pariaman Tengah	9	1.540
393	Sekretaris Lurah Jati Hilir	Kecamatan Pariaman Tengah	8	1.320
394	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pariaman Tengah	8	1.165
395	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Pembangunan	Kecamatan Pariaman Tengah	8	1.165
396	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Pariaman Tengah	8	1.165

<i>2. KELURAHAN KAMPUNG PONDOK</i>				
397	Lurah Kampung Pondok	Kecamatan Pariaman Tengah	9	1.540
398	Sekretaris Lurah Kampung Pondok	Kecamatan Pariaman Tengah	8	1.320
399	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pariaman Tengah	8	1.165
400	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Pembangunan	Kecamatan Pariaman Tengah	8	1.165
401	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Pariaman Tengah	8	1.165
<i>3. KELURAHAN KAMPUNG JAWA I</i>				
402	Lurah Kampung Jawa I	Kecamatan Pariaman Tengah	9	1.540
403	Sekretaris Lurah Kampung Jawa I	Kecamatan Pariaman Tengah	8	1.320
404	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pariaman Tengah	8	1.165
405	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Pembangunan	Kecamatan Pariaman Tengah	8	1.165
406	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Pariaman Tengah	8	1.165
<i>4. KELURAHAN KAMPUNG JAWA II</i>				
407	Lurah Kampung Jawa II	Kecamatan Pariaman Tengah	9	1.540
408	Sekretaris Lurah Kampung Jawa II	Kecamatan Pariaman Tengah	8	1.320
409	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pariaman Tengah	8	1.165
410	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Pembangunan	Kecamatan Pariaman Tengah	8	1.165
411	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Pariaman Tengah	8	1.165
<i>5. KELURAHAN JAWI-JAWI I</i>				
412	Lurah Jawi-Jawi I	Kecamatan Pariaman Tengah	9	1.540
413	Sekretaris Lurah Jawi-Jawi I	Kecamatan Pariaman Tengah	8	1.320
414	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pariaman Tengah	8	1.165
415	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Pembangunan	Kecamatan Pariaman Tengah	8	1.165
416	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Pariaman Tengah	8	1.165
<i>6. KELURAHAN JAWI-JAWI II</i>				
417	Lurah Jawi-Jawi II	Kecamatan Pariaman Tengah	9	1.540
418	Sekretaris Lurah Jawi-Jawi II	Kecamatan Pariaman Tengah	8	1.320
419	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pariaman Tengah	8	1.165
420	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Pembangunan	Kecamatan Pariaman Tengah	8	1.165
421	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Pariaman Tengah	8	1.165
<i>7. KELURAHAN ALAI GELOMBANG</i>				
422	Lurah Alai Gelombang	Kecamatan Pariaman Tengah	9	1.540
423	Sekretaris Lurah Alai Gelombang	Kecamatan Pariaman Tengah	8	1.320
424	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pariaman Tengah	8	1.165
425	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Pembangunan	Kecamatan Pariaman Tengah	8	1.165
426	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Pariaman Tengah	8	1.165
<i>8. KELURAHAN PONDOK II</i>				
427	Lurah Pondok II	Kecamatan Pariaman Tengah	9	1.540
428	Sekretaris Lurah Pondok II	Kecamatan Pariaman Tengah	8	1.320
429	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pariaman Tengah	8	1.165
430	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Pembangunan	Kecamatan Pariaman Tengah	8	1.165
431	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Pariaman Tengah	8	1.165

<i>9. KELURAHAN KAMPUNG PERAK</i>				
432	Lurah Kampung Perak	Kecamatan Pariaman Tengah	9	1.540
433	Sekretaris Lurah Kampung Perak	Kecamatan Pariaman Tengah	8	1.320
434	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pariaman Tengah	8	1.165
435	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Pembangunan	Kecamatan Pariaman Tengah	8	1.165
436	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Pariaman Tengah	8	1.165
<i>10. KELURAHAN JALAN BARU</i>				
437	Lurah Jalan Baru	Kecamatan Pariaman Tengah	9	1.540
438	Sekretaris Lurah Jalan Baru	Kecamatan Pariaman Tengah	8	1.320
439	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pariaman Tengah	8	1.165
440	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Pembangunan	Kecamatan Pariaman Tengah	8	1.165
441	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Pariaman Tengah	8	1.165
<i>11. KELURAHAN JALAN KERETA API</i>				
442	Lurah Jalan Kereta Api	Kecamatan Pariaman Tengah	9	1.540
443	Sekretaris Lurah Jalan Kereta Api	Kecamatan Pariaman Tengah	8	1.320
444	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pariaman Tengah	8	1.165
445	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Pembangunan	Kecamatan Pariaman Tengah	8	1.165
446	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Pariaman Tengah	8	1.165
<i>12. KELURAHAN LOHONG</i>				
447	Lurah Lohong	Kecamatan Pariaman Tengah	9	1.540
448	Sekretaris Lurah Lohong	Kecamatan Pariaman Tengah	8	1.320
449	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pariaman Tengah	8	1.165
450	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Pembangunan	Kecamatan Pariaman Tengah	8	1.165
451	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Pariaman Tengah	8	1.165
<i>13. KELURAHAN UJUNG BATUNG</i>				
452	Lurah Ujung Batung	Kecamatan Pariaman Tengah	9	1.540
453	Sekretaris Lurah Ujung Batung	Kecamatan Pariaman Tengah	8	1.320
454	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pariaman Tengah	8	1.165
455	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Pembangunan	Kecamatan Pariaman Tengah	8	1.165
456	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Pariaman Tengah	8	1.165
<i>14. KELURAHAN PASIR</i>				
457	Lurah Pasir	Kecamatan Pariaman Tengah	9	1.540
458	Sekretaris Lurah Pasir	Kecamatan Pariaman Tengah	8	1.320
459	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pariaman Tengah	8	1.165
460	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Pembangunan	Kecamatan Pariaman Tengah	8	1.165
461	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Pariaman Tengah	8	1.165
<i>15. KELURAHAN TARATAK</i>				
462	Lurah Taratak	Kecamatan Pariaman Tengah	9	1.540
463	Sekretaris Lurah taratak	Kecamatan Pariaman Tengah	8	1.320
464	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pariaman Tengah	8	1.165
465	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Pembangunan	Kecamatan Pariaman Tengah	8	1.165

466	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Pariaman Tengah	8	1.165
<i>16. KELURAHAN KARAN AUR</i>				
467	Lurah Karan Aur	Kecamatan Pariaman Tengah	9	1.540
468	Sekretaris Lurah Karan Aur	Kecamatan Pariaman Tengah	8	1.320
469	Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pariaman Tengah	8	1.165
470	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Pembangunan	Kecamatan Pariaman Tengah	8	1.165
471	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Pariaman Tengah	8	1.165

II. NILAI HARGA JABATAN FUNGSIONAL UMUM DAN FUNGSIONAL TERTENTU

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	HARGA JABATAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<i>SEKRETARIAT DAERAH</i>			
1	Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan	13	2.715
2	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	13	2.715
3	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan	13	2.715
<i>BAGIAN PEMERINTAHAN</i>			
4	Analisis Data dan Informasi	7	890
5	Pengadministrasian Pemerintahan	5	490
6	Pengadministrasian Persuratan	5	490
7	Penata Keuangan	7	890
8	Analisis Data dan Informasi	7	890
9	Pengadministrasian Otonomi Daerah	5	490
10	Analisis Perencanaan dan Kerjasama	7	890
11	Pengadministrasian Batas Wilayah	5	490
12	Teknisi Pemetaan dan Penggambaran	5	490
<i>BAGIAN HUKUM DAN HAM</i>			
13	Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	7	890
14	Analisis Hukum	7	890
15	Pengelola Keuangan	6	690
16	Analisis Konsultasi dan Bantuan Hukum	7	890
17	Pengelola Bantuan Hukum	6	690
18	Analisis Permasalahan Hukum	7	890
19	Analisis Publikasi	7	890
20	Pengadministrasian Hukum	5	490
21	Pengadministrasian Data Penyajian dan Publikasi	5	490
<i>BAGIAN ORGANISASI DAN APARATUR</i>			
22	Analisis Kelembagaan	7	890
23	Pengadministrasian Umum	5	490
24	Pengolah Data Kelembagaan	6	690
25	Analisis Organisasi dan Tata Laksana	7	890
26	Analisis Hubungan Antar Lembaga	7	890
27	Penata Keuangan	7	890
28	Analisis Jabatan	7	890
29	Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur	7	890
30	Pengadministrasian Kepegawaian	5	490

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
31	Pengadministrasi Persuratan	5	490
32	Penyuluh Kepemudaan	7	890
33	Pengadministrasi Umum	5	490
34	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	890
35	Pengelola Kegiatan Hari Besar Keagamaan	6	690
36	Pengelola Keuangan	6	690
BAGIAN EKONOMI PEMBANGUNAN			
37	Perancang Desain Pameran	7	890
38	Analisis Ketahanan Ekonomi	7	890
39	Pengadministrasi Persuratan	5	490
40	Analisis Pembangunan	7	890
41	Pengadministrasi Keuangan	5	490
42	Pengelola Unit Layanan Pengadaan	6	690
43	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	7	890
44	Perancang Kebijakan Barang dan Jasa	7	890
BAGIAN UMUM DAN PROTOKOLER			
45	Analisis Tata Usaha	7	890
46	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	7	890
47	Pengadministrasi Umum	5	490
48	Pengadministrasi Persuratan	5	490
49	Pengemudi	3	340
50	Sekretaris	6	690
51	Penyusun Naskah Rapat Pimpinan	7	890
52	Ajudan	6	690
53	Pengemudi VIP	4	440
54	Analisis Protokol	7	890
55	Analisis Layanan Umum	7	890
56	Pengelola Rumah Tangga	6	690
57	Penata Laporan Keuangan	7	890
58	Penata Keuangan	7	890
59	Bendahara	7	890
BAGIAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN			
62	Penyuluh Kearsipan	7	890
60	Pranata Kearsipan	6	690
61	Pengelola Keuangan	6	690
63	Pengadministrasi Perpustakaan	5	490
64	Penyusun Rencana Kehumasan dan Perpustakaan	7	890
65	Penyuluh Perpustakaan	7	890
66	Pengelola Perpustakaan	6	690
<i>SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</i>			
KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN			
67	Analisis Rencana dan Program	7	890
68	Analisis Perencanaan	7	890
69	Analisis Pengelolaan Sistem Informasi	7	890
70	Pengadministrasi Umum	5	490
71	Analisis Kebijakan Barang Milik Negara	7	890
72	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690
73	Pengemudi	3	340

74	Analisis Pengelolaan Sistem Informasi Perbendaharaan	7	890
75	Pengelola Gaji	6	690
76	Pengadministrasi Keuangan	5	490
77	Penyusun Laporan Keuangan	7	890
78	Bendahara	7	890
KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN			
79	Penyusun Naskah Pimpinan	7	890
80	Pengadministrasi Data Peraturan Perundang - Undangan	5	490
81	Pengelola Peraturan Perundang Undangan	6	690
82	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	5	490
83	Pengelola Persidangan	6	690
84	Analisis Materi Sidang	7	890
85	Pengadministrasi Risalah	5	490
86	Penyusun Risalah	7	890
KEPALA BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN			
87	Analisis Kebijakan Penganggaran	7	890
88	Pengolah Data Penganggaran	6	690
89	Pengadministrasi Umum	5	490
90	Analisis Bidang Pengawasan	7	890
91	Pengelola Pengawasan	6	690
92	Pengadministrasi Umum	5	490
93	Pengolah Data Kebijakan Penganggaran	7	890
INSPEKTORAT			
94	Analisis Tata Usaha	7	890
95	Analisis Laporan Hasil Pelaporan	7	890
96	Analisis Tata Usaha	7	890
97	Analisis Laporan Hasil Pelaporan	7	890
98	Analisis Tata Usaha	7	890
99	Analisis Laporan Hasil Pelaporan	7	890
JABATAN FUNGSIONAL			
100	JF Auditor Madya	11	1.930
101	JF Auditor Muda	9	1.355
102	JF Auditor Pertama	8	1.280
103	JF Auditor Pelaksana	6	740
104	JF Auditor Pelaksana Lanjutan	7	1.005
105	JF Auditor Penyelia	8	1.230
106	JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Madya	11	1.930
107	JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Muda	9	1.355
108	JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Pertama	8	1.280
SEKRETARIAT INSPEKTORAT			
109	Analisis Laporan Hasil Audit	7	890
110	Analisis Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	7	890
111	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	890
112	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	7	890
113	Bendahara	7	890
114	Pengolah Daftar Gaji	6	690
115	Analisis Keuangan	7	890
116	Verifikator Keuangan	6	690
117	Analisis layanan umum	7	890

118	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6	690
119	Pengemudi	3	340
<i>DINAS PENDIDIKAN</i>			
SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN			
120	Bendahara	7	890
121	Analisis Keuangan	7	890
122	Pengolah Daftar Gaji	6	690
123	Pengadministrasi Penerimaan	5	490
124	Pengadministrasi Keuangan	5	490
125	Penata Keuangan	7	890
126	Pengolah Data Perbendaharaan	6	690
127	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	890
128	Analisis Perencanaan Penganggaran	7	890
129	Analisis Pengelolaan Sarana Program	7	890
130	Analisis Akuntabilitas Kinerja dan Aparatur	7	890
131	Pengadministrasi Kepegawaian	5	490
132	Pramu Bakti	1	190
133	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	7	890
134	Pengadministrasi Persuratan	5	490
135	Pengemudi	3	340
136	Pengolah Data	6	690
137	Pranata Pasukan Pengamanan Dalam	5	490
138	Pengadministrasi Umum	5	490
BIDANG PENDIDIKAN PEMBINAAN PAUD NON FORMAL			
139	Pengadministrasi Kurikulum	5	490
140	Analisis Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan	7	890
141	Pengadministrasi Pendidik dan Tenaga Pendidikan	5	490
142	Analisis Pendidik dan Tenaga Pendidikan	7	890
143	Pengadministrasi Sertifikasi	5	490
144	Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana	7	890
145	Pengolah Data	6	690
146	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	490
BIDANG PENDIDIKAN DASAR			
147	Pengadministrasi Kurikulum	5	490
148	Analisis Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan	7	890
149	Pengadministrasi Pendidik dan Tenaga Pendidikan	5	490
150	Analisis Informasi	7	890
151	Pengadministrasi Sertifikasi	5	490
152	Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana	7	890
153	Pengolah Data	6	690
154	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	490
BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA			
155	Analisis Olahraga	7	890
156	Pengawas Olahraga	7	890
157	Analisis Kepemudaan	7	890
158	Penyuluh Kepemudaan	7	890
159	Pengadministrasi Umum	5	490
160	Pengelola Data	6	690
161	Penyuluh Olahraga	7	890

SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR			
162	Analisis Kelembagaan Kursus dan Pelatihan	7	890
163	Analisis Kursus dan Kesetaraan	7	890
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU			
164	JF Pengawas Sekolah Madya	11	1.960
165	JF Penilik Madya	11	1.930
166	JF Guru Pertama	8	1.280
167	JF Guru Muda	9	1.385
168	JF Guru Madya	11	1.960
<i>DINAS KESEHATAN</i>			
SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN			
169	Analisis Data dan Informasi	7	890
170	JF Administrator Kesehatan Pertama	8	1.280
171	Analisis Tatausaha	7	890
172	JF Analisis Kepegawaian Pertama	8	1.280
173	Pengadministrasi Umum	5	490
174	Analisis Barang Milik Negara	7	890
175	Perancang Sistem Informasi Kepegawaian	7	890
176	Pramu Kebersihan	1	190
177	Petugas Keamanan	3	340
178	Pengemudi	3	340
179	Bendahara	7	890
180	Penyusun Laporan Keuangan	7	890
181	Penata Keuangan	7	890
182	Verifikator Keuangan	6	690
183	Pengadministrasi Keuangan	5	490
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN			
184	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	1.310
185	Inspektur Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7	890
186	Penyusun rencana Monitoring dan akreditasi	7	890
187	Penyuluh Obat dan Makanan	7	890
188	Analisis data dan kerjasama pemasyarakatan	7	890
189	JF Administrator Kesehatan Muda	9	1.355
190	JF Administrator Kesehatan Pertama	8	1.280
191	Analisis Pembayaran jaminan kesehatan	7	890
192	Analisis Jabatan	7	890
193	Analisis Perizinan	7	890
BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT			
194	Analisis Penyakit Menular	7	890
195	JF Epidemiologi Kesehatan Pertama	8	1.280
196	Pengelola Pemberantasan Penyakit Menular Langsung	6	690
197	Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit	7	890
198	Pengawas Monitoring dan Evaluasi Imunisasi Puskesmas	7	890
199	Pengawas Program Surveilans	7	890
200	JF Perawat Muda	9	1.385
201	JF Administrator Kesehatan Pertama	8	1.280
202	Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit	7	890
BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DAN PROMOSI KESEHATAN			
203	JF Nutrisiionis Pertama	8	1.280

204	JF Nutrisionis Muda	9	1.555
205	JF Penyuluh Kesehatan Pertama	8	1.310
206	Pengelola Layanan Keluarga Berencana, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia	6	690
207	Analisis Gizi	7	890
208	Analisis Kesehatan ibu dan anak	7	890
209	JF Penyuluh Kesehatan Pertama	8	1.310
210	Penyusun Promosi dan Kerja sama	7	890
211	JF Administrator Kesehatan Pertama	8	1.280
212	JF Epidemiologi Kesehatan Pertama	8	1.280
213	Pengawas keselamatan dan kesehatan kerja dan Perlindungan Lingkungan	7	890
UPTD INSTALASI FARMASI			
214	Penata Keuangan	7	890
215	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690
216	Pengadministrasi Umum	5	490
217	Pranata Pasukan Pengamanan Dalam	5	490
218	Pengadministrasi Keuangan	5	490
219	Pramu Kebersihan	1	190
JABATAN FUNGSIONAL			
220	JF Asisten Apoteker Penyelia	8	1.245
221	JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	7	1.020
UPTD PUSKESMAS PARIAMAN			
222	Analisis Pajak/ Retribusi Daerah	7	890
223	Pengelola Keuangan	6	690
224	Analisis Kebijakan Klasifikasi Barang	7	890
225	Analisis Data dan Informasi	7	890
226	Pengadministrasi Keuangan	5	490
227	Pengadministrasi Kepegawaian	5	490
228	Pengelola Data	6	690
229	Pengemudi Ambulan	4	440
230	Pramu Kebersihan	1	190
231	Pengambil Sampel	3	340
232	Petugas Keamanan	3	340
233	Pengelola Kebidanan	6	690
JABATAN FUNGSIONAL			
234	JF Dokter Madya	12	2.225
235	JF Dokter Gigi Madya	12	2.225
236	JF Administrator Kesehatan Madya	11	1.930
237	JF Administrator Kesehatan Muda	9	1.355
238	JF Administrator Kesehatan Pertama	8	1.280
239	JF Bidan Madya	11	1.930
240	JF Dokter Muda	10	1.720
241	JF Perawat Muda	9	1.385
242	JF Apoteker Pertama	8	1.295
243	JF Bidan Pertama	8	1.280
244	JF Nutrisionis Muda	9	1.555
245	JF Perawat Pertama	8	1.310
246	JF Perawat Pelaksana Lanjutan	7	1.035
247	JF Bidan Pelaksana Lanjutan	7	1.005
248	JF Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	7	1.035

249	JF Refraksionis Optisen Pelaksana lanjutan	7	1.035
250	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	1.005
251	JF Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	7	1.035
252	JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	7	1.020
253	JF Perawat Pelaksana	6	770
254	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	1.385
255	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	1.310
256	JF Sanitarian Pertama	8	1.295
257	JF Bidan Pelaksana Lanjutan	7	1.005
258	JF Epidemiolog Kesehatan Muda	9	1.555
259	JF Bidan Pelaksana	6	740
UPTD PUSKESMAS KURAI TAJI			
260	Penata Keuangan	7	890
261	Pengadministrasi Keuangan	5	490
262	Pengadministrasi Penerimaan	5	490
263	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690
264	Pengemudi Ambulan	4	440
265	Pramu Kebersihan	1	190
266	Petugas Keamanan	3	340
267	Pengelola Kebidanan	6	690
268	Analisis Gizi	7	890
269	Analisis Kesehatan	7	890
270	Analisis Penyakit Menular	7	890
271	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	890
272	Analisis Data dan Informasi	7	890
273	Analisis Program Penyuluhan	7	890
274	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	7	890
JABATAN FUNGSIONAL			
275	JF Apoteker Madya	11	1.945
276	JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	7	1.035
277	JF Bidan Penyelia	8	1.230
278	JF Bidan Pelaksana	6	740
279	JF Bidan Pelaksana Lanjutan	7	1.005
280	JF Bidan Pertama	8	1.280
281	JF Bidan Madya	11	1.930
282	JF Dokter Gigi Muda	10	1.670
283	JF Dokter Muda	10	1.720
284	JF Dokter Pertama	9	1.570
285	JF Nutrisionis Pertama	8	1.280
286	JF Nutrisionis Muda	9	1.570
287	JF Perawat Gigi Penyelia	8	1.260
288	JF Perawat Penyelia	8	1.260
289	JF Perawat Pelaksana	6	770
290	JF Perawat Pelaksana Lanjutan	7	1.035
291	JF Perekam Medis Penyelia	8	1.260
292	JF Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	7	1.035
293	JF Perekam Medis Pelaksana	6	770
294	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	9	1.355
295	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	6	740
296	JF Sanitarian Pelaksana Lanjutan	7	1.020

297	JF Sanitarian Pelaksana	6	755
298	JF Administrator Kesehatan Pertama	8	1.280
299	JF Administrator kesehatan Muda	9	1.355
300	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	1.385
301	JF Epidemiolog Muda	9	1.555
UPTD PUSKESMAS MARUNGGI			
302	Analisis Data dan Informasi	7	890
303	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690
304	Penata Keuangan	7	890
305	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	7	890
306	Pengadministrasi Keuangan	5	490
307	Pengadministrasi Umum	5	490
308	Pengadministrasi Kepegawaian	5	490
309	Pengemudi Ambulan	4	440
310	Pranata Pasukan Pengamanan Dalam	6	690
311	Pengelola Kebidanan	6	690
JABATAN FUNGSIONAL			
312	JF Dokter Muda	10	1.720
313	JF Dokter Madya	12	2.225
314	JF Dokter Gigi Madya	12	2.225
315	JF Apoteker Pertama	8	1.295
316	JF Bidan Penyelia	8	1.230
317	JF Bidan Pelaksana Lanjutan	7	1.005
318	JF Bidan Pelaksana	6	740
319	JF Perawat Penyelia	8	1.260
320	JF Perawat Pelaksana Lanjutan	7	1.035
321	JF Perawat Pelaksana	6	770
322	JF Perawat gigi Pelaksana	6	770
323	JF Nutrisisionis Pelaksana Lanjutan	7	1.005
324	JF Nutrisisionis Pelaksana	6	740
325	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	1.005
326	JF Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	7	1.035
327	JF Perekam Medis Pelaksana	6	770
328	JF Sanitarian Pelaksana	6	755
329	JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	7	1.020
330	JF Asisten Apoteker Pelaksana	6	755
331	JF Refraksionis Optisien Pelaksana	6	770
UPTD PUSKESMAS AIR SANTOK			
332	Penata Keuangan	7	890
333	Pengadministrasi Keuangan	5	490
334	Pengelola Kepegawaian	6	690
335	Pengadministrasi Penerimaan	5	490
336	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690
337	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	7	890
338	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	890
339	Analisis Data dan Informasi	7	890
340	Pengelola Kebidanan	6	690
341	Pramu Kebersihan	1	190
342	Pengemudi Ambulan	4	440
343	Petugas Keamanan	3	340

JABATAN FUNGSIONAL			
344	JF Apoteker Madya	11	1.945
345	JF Dokter Muda	10	1.720
346	JF Dokter Gigi Madya	12	2.225
347	JF Perawat Penyelia	8	1.260
348	JF Perawat Pelaksana Lanjutan	7	1.035
349	JF Perawat Pelaksana	6	770
350	JF Bidan Madya	9	1.930
351	JF Bidan Pertama	8	1.280
352	JF Bidan Pelaksana	6	740
353	JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	7	1.020
354	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	8	1.280
355	JF Nutrisionis Pelaksana Lanjutan	7	1.005
356	JF Sanitarian Pertama	8	1.295
357	JF Sanitarian Pelaksana Lanjutan	7	1.020
358	JF Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	7	1.035
359	JF Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	7	1.035
360	JF Epidemiolog Kesehatan Pertama	8	1.280
361	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	1.385
362	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	1.005
363	JF Administrator Kesehatan Pertama	8	1.280
UPTD PUSKESMAS SIKAPAK			
364	Pengadministrasi Penerimaan	5	490
365	Penata Keuangan	7	890
366	Analisis Data dan Informasi	7	890
367	Pengadministrasi Keuangan	5	490
368	Pengadministrasi Kepegawaian	5	490
369	Pengadministrasi Umum	5	490
370	Pengelola Data	6	690
371	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690
372	Pengelola Kebidanan	6	690
373	Pramu Kebersihan	1	190
374	Pengambil Sampel	5	490
375	Pengemudi Ambulan	4	440
JABATAN FUNGSIONAL			
376	JF Dokter Madya	12	2.225
377	JF Dokter Pertama	9	1.570
378	JF Dokter Gigi Pertama	9	1.370
379	JF Apoteker Pertama	8	1.295
380	JF Perawat Muda	9	1.385
381	JF Perawat Penyelia	8	1.260
382	JF Perawat Pelaksana Lanjutan	7	1.035
383	JF Perawat Pelaksana	6	770
384	JF Bidan Pertama	8	1.280
385	JF Bidan Penyelia	8	1.230
386	JF Bidan Pelaksana	6	740
387	JF Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	7	1.035
388	JF Nutrisionis Pelaksana Lanjutan	7	1.005
389	JF Nutrisionis Pelaksana	6	740
390	JF Sanitarian Pelaksana Lanjutan	7	1.020

391	JF Administrator Kesehatan Muda	9	1.355
392	JF Administrator Kesehatan Pertama	8	1.280
393	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	1.310
394	JF Epidemiolog Pertama	8	1.280
395	JF Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	7	1.035
396	JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	7	1.020
397	JF Pranata Laboratorium kesehatan Pelaksana	6	740
UPTD PUSKESMAS KAMPUNG BARU PADUSUNAN			
398	Penata Keuangan	7	890
399	Pengadministrasi Keuangan	5	490
400	Pengadministrasi Penerimaan	5	490
401	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690
402	Pengelola Kepegawaian	6	690
403	Analisis Perencanaan Anggaran	7	890
404	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	7	890
405	Pengadministrasi Persuratan	5	490
406	Pengemudi Ambulan	4	440
407	Pramu Kebersihan	1	190
408	Pengelola Kebidanan	6	690
409	Petugas Keamanan	3	340
410	Analisis Data Dan Informasi	7	890
JABATAN FUNGSIONAL			
411	JF Apoteker Muda	9	1.370
412	JF Apoteker Pertama	8	1.295
413	JF Asisten Apoteker Pelaksana	6	755
414	JF Bidan Madya	11	1.930
415	JF Bidan Penyelia	8	1.230
416	JF Bidan Pertama	8	1.280
417	JF Bidan Pelaksana Lanjutan	7	1.005
418	JF Bidan Pelaksana	6	740
419	JF Dokter Gigi Pertama	9	1.370
420	JF Dokter Pertama	9	1.570
421	JF Dokter Madya	12	2.225
422	JF Nutrisionis Pelaksana	6	740
423	JF Perawat Gigi Pelaksana	6	770
424	JF Perawat Pertama	8	1.310
425	JF Perawat Muda	9	1.385
426	JF Perawat Pelaksana Lanjutan	7	1.035
427	JF Perawat Pelaksana	6	770
428	JF Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	7	1.035
429	JF Perekam Medis Pelaksana	6	770
430	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	1.005
431	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	6	740
432	JF Sanitarian Pelaksana Lanjutan	7	1.020
433	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda	9	1.385
434	JF Administrator Kesehatan Muda	9	1.355
435	JF Epidemiolog Kesehatan Muda	9	1.555

UPTD PUSKESMAS NARAS			
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU			
436	JF Dokter Muda	10	1.720
437	JF Dokter Gigi Muda	10	1.670
438	JF Perawat Pelaksana Lanjutan	7	1.035
439	JF Perawat Penyelia	8	1.260
440	JF Perawat Muda	8	1.310
441	JF Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	6	770
442	JF Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	7	1.035
443	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	1.035
444	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	1.245
445	JF Sanitarian Penyelia	8	1.245
446	JF Apoteker Muda	9	1.370
447	JF Refraksi Optisien Pelaksana Lanjutan	7	1.035
448	JF Bidan Pertama	8	1.280
449	JF Bidan Penyelia	8	1.230
450	JF Bidan Pelaksana	6	740
451	JF Bidan Pelaksana Lanjutan	7	1.005
452	JF Nutrisionis Pelaksana	6	740
453	JF Sanitarian Pelaksana	6	755
454	JF Asisten Apoteker Pelaksana	6	755
JABATAN FUNGSIONAL UMUM			
455	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	7	890
456	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	890
457	JF Administrasi Kesehatan Masyarakat Muda	7	890
458	Analisis Penyakit Menular	7	890
459	Analisis Data dan Informasi	7	890
460	Analisis Program Penyuluhan	7	890
461	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690
462	Pengelola Kebidanan	6	690
463	Pengadministrasian Keuangan	5	490
464	Pengadministrasian Penerimaan	5	490
465	Petugas Keamanan	3	340
466	Pengemudi Ambulan	4	440
467	Pramu Kebersihan	1	190
<i>DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN</i>			
SEKRETARIAT DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN			
468	Pengelola Bahan Perencanaan	6	690
469	Pengadministrasian Umum	5	490
470	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690
471	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	7	890
472	Pengadministrasian Kepegawaian	5	490
473	Pranata Kearsipan	6	690
474	Verifikator Keuangan	6	690
475	Bendahara	7	890
476	Pengelola Gaji	6	690
477	Pengadministrasian Penerimaan	5	490
BIDANG BINA MARGA			
478	Analisis Perencanaan	7	890
479	Pengawas Jalan Dan Jembatan	7	890
480	Pengelola Kelengkapan Jalan	6	690

481	Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Jalan	6	690
482	Analisis Jalan Jembatan	7	890
483	Pengadministrasi Umum	5	490
484	Analisis Perencanaan	7	890
485	Pengawas Jalan Dan Jembatan	7	890
486	Pengadministrasi Umum	5	490
487	Pemelihara Jalan	5	490
BIDANG PENGAIRAN			
488	Analisis Perencanaan	7	890
489	Pengawas Irigasi	7	890
490	Penjaga Pintu Air	3	340
491	Pengamat Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	7	890
492	Pengelola Irigasi	6	690
493	Analisis Perencanaan	7	890
494	Pengawas Pengairan	7	890
495	Pengelola Pengairan	6	690
496	Pengelola Penataan Sarana Dan Prasarana	6	690
497	Pengadministrasi Umum	5	490
BIDANG TATA RUANG DAN PENATAAN BANGUNAN			
498	Pengawas Tata Ruang	7	890
499	Pengawas Bangunan dan Taman	7	890
500	Analisis Insfrastuktur	7	890
501	Pengelola Bahan Perencanaan	6	690
502	Teknisi Pemetaan Dan Penggambaran	5	490
503	Analisis Dokumen Perizinan	7	890
504	Analisis Perencanaan	7	890
505	Pengadministrasi Umum	5	490
506	Pengelola IMB Gedung/ Bangunan	6	690
507	Pengawas Bangunan dan Gedung	7	890
BIDANG PERTANAHAN			
508	Analisis Data Pengadaan Tanah	7	890
509	Teknisi Pemetaan dan Penggambaran	5	490
510	Analisis Perkara Tanah dan Ruang	7	890
511	Analisis Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang	7	890
512	Analisis Hukum Pertanahan	7	890
513	Mediator Pertanahan	7	890
514	Analisis Pengaturan Pengadaan	7	890
UPTD PERALATAN DAN PERBEKALAN SERTA PENERANGAN JALAN UMUM			
515	Analisis Perencanaan	7	890
516	Pengawas Kelistrikan	7	890
517	Penata Keuangan	7	890
518	Pengadministrasi Umum	5	490
519	Operator Alat Berat	5	490
520	Pengadministrasi Keuangan	5	490
521	Pemelihara Peralatan	5	490
522	Pengemudi	3	340

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
SEKRETARIAT DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			
523	Analisis Jabatan	7	890
524	Pengadministrasi Persuratan	5	490
525	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	490
526	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690
527	Pengadministrasi Analisis dan Kemitraan Media	5	490
528	Pengemudi	3	340
529	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	890
530	Pengelola Program dan Laporan	6	690
531	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	490
532	Pengadministrasi Umum	5	490
533	Bendahara	7	890
534	Pengelola Gaji	6	690
535	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690
536	Pengadministrasi Penerimaan	5	490
537	Verifikator Keuangan	6	690
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
538	Pengawas Fisik Permukiman	7	890
539	Pengelola Perumahan dan Pemukiman	6	690
540	Analisis Penataan Kawasan	7	890
541	Pengadministrasi Umum	5	490
542	Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan	7	890
543	Penelaah Penyehatan Lingkungan Pemukiman	7	890
544	Pengelola Penyehatan Lingkungan	6	690
545	Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman	7	890
546	Pengadministrasi Umum	5	490
BIDANG PENATAAN DAN PENAAATAN PPLH			
547	Analisis Dokumen Perizinan	7	890
548	Penelaah Dampak Lingkungan	7	890
549	Penyusun Program Pengawasan Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup	7	890
550	Pengelola Informasi Lingkungan	6	690
BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN			
551	Penyuluh Lingkungan Hidup	7	890
552	Pengadministrasi Akreditasi Lingkungan	5	490
553	Pengadministrasi Umum	5	490
554	Analisis Rehabilitasi dan Konservasi	7	890
555	Pengelola Lingkungan	6	690
BIDANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN			
556	Analisis Taman	7	890
557	Pranata Taman	5	490
558	Pramu Taman	1	190
559	Pengadministrasi Umum	5	490
560	Pengawas Lapangan Petugas Pertamanan	7	890
561	Pengemudi	3	340
562	Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Jalan, Saluran, dan Selokan	7	890
563	Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Tempat Pembuangan Akhir	7	890
564	Pramu Kebersihan	1	190
565	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	490
566	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	6	690
567	Pengemudi	3	340

568	Juru Pungut Kebersihan	5	490
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN			
569	Penata Keuangan	7	890
570	Pengadministrasi Keuangan	5	490
571	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690
572	Pengelola Program dan Laporan	6	690
573	Pengelola Laboratorium	6	690
574	Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Perlindungan Lingkungan	7	890
575	Analisis Penjamin Mutu	7	890
576	Pengelola Fasilitas Pengujian, Pemeriksa dan Perawatan	6	690
577	Pengelola Sampel Pengujian	6	690
578	Teknisi Laboratorium	5	490
579	Petugas Pengambil Contoh	5	490
580	Pranata Standar Keselamatan	6	690
581	Pengelola Limbah	6	690
582	Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi	6	690
583	Pengadministrasi Contoh Uji	5	490
584	Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan	7	890
585	Penyusun Bahan Audit Laboratorium	7	890
UPTD AIR BERSIH			
586	Analisis Pengelolaan Sumber Daya Air	7	890
587	Pengelola Penggunaan dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air	6	690
588	Pengelola Sumber Daya Air	6	690
589	Penata Keuangan	7	890
590	Pengadministrasi Keuangan	5	490
591	Pengadministrasi Umum	5	490
592	Teknisi Air	5	490
593	Teknisi Peralatan dan Mesin	5	490
594	Pengemudi	3	340
DINAS SOSIAL			
SEKRETARIAT DINAS SOSIAL			
595	Pengadministrasi Umum	5	490
596	Pengemudi	3	340
597	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690
598	Pengelola Dokumentasi	6	690
599	Analisis Perencanaan	7	890
600	Pramu Kebersihan	1	190
601	Pengadministrasi Kepegawaian	5	490
602	Bendahara	7	890
603	Pengelola Gaji	6	690
604	Verifikator Keuangan	6	690
605	Analisis Laporan Realisasi Anggaran	7	890
BIDANG REHABILITASI DAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL			
606	Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial	7	890
607	Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial	6	690
608	Analisis Dampak Sosial	7	890
609	Pengelola Rehabilitasi Sosial	6	690
610	Pengelola Perlindungan Sosial	6	690
611	Analisis Bencana	7	890
BIDANG PEMBINAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN			
612	Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat	7	890

613	Pengelola Bimbingan Masyarakat	6	690
614	Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat	7	890
615	Pengelola Kesejahteraan Sosial	6	690
616	Pengelola Pemberdayaan Lembaga Sosial	6	690
617	Analisis Kelembagaan masyarakat	7	890
DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA			
SEKRETARIAT DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN NAKER			
618	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	7	890
619	Pranata Kearsipan	6	690
620	Analisis Barang Milik Negara	7	890
621	Pengelola Data Perencanaan dan Penganggaran	6	690
622	Pengadministrasi Umum	5	490
623	Pramu Kebersihan	1	190
624	Petugas Keamanan	3	340
625	Pengemudi	3	340
626	Bendahara	7	890
627	Pengelola Gaji	6	690
628	Penata Keuangan	7	890
629	Pengelola Keuangan	6	690
BIDANG PENANAMAN MODAL			
630	Penyusun Rencana Investasi	7	890
631	Pengelola Permodalan dan Investasi	6	690
632	Analisis Kerjasama dan Permodalan	7	890
633	Pengelola SIM Penanaman Modal dan Perizinan	6	690
BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
634	Analisis Dokumen Perizinan	7	890
635	Pengolah Data Perizinan	6	690
636	Analisis Perizinan	7	890
637	Pengadministrasi Perizinan	5	490
638	Pelaksana Survey	5	490
BIDANG TENAGA KERJA			
639	Analisis Penempatan Tenaga Kerja	7	890
640	Penyuluh Tenaga Kerja	7	890
641	Analisis Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia	7	890
642	Pengelola Bahan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	6	690
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK dan KB			
SEKRETARIAT DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB			
643	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	890
644	Pengelola Bahan Perencanaan	6	690
645	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690
646	Pengelola Kepegawaian	6	690
647	Pengemudi	3	340
648	Bendahara	7	890
649	Penata Keuangan	7	890
650	Pengelola Keuangan	6	690
651	Verifikator Keuangan	6	690
652	Pengelola Gaji	6	690
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
653	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak	7	890

654	Analisis Perlindungan Perempuan	7	890
655	Pengadministrasi Umum	5	490
656	Pengelola Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak	6	690
657	Penyuluh Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	7	890
658	Pengawas Perempuan dan Anak	7	890
659	Pengelola Penguatan Pengarusutamaan Gender dan Anak	6	690
660	Pengelola Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak	6	690
661	Pengadministrasi Pengangkatan dan Pengakuan Anak	5	490
662	Pengawas Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	7	890
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
663	Analisis Keluarga Berencana	7	890
664	Pemeriksa Pelayanan Keluarga Berencana	7	890
665	Pengelola Advokasi, Konseling, Pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	6	690
666	Analisis Keluarga Sejahtera	7	890
667	Pengadministrasi Umum	5	490
668	Penyusun Data Ketahanan Keluarga	7	890
669	Pengelola Pembinaan Ketahanan Keluarga	6	690
670	Penyusun Pencatatan dan Pelaporan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana	7	890
671	Analisis Mekanisme Operasional Keluarga Berencana	7	890
672	Pengadministrasi Umum	5	490
673	Penyusun Bahan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana	7	890
DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN			
SEKRETARIAT PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN			
674	Pengadministrasi Umum	5	490
675	Pengelola Kepegawaian	6	690
676	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	7	890
677	Analisis Tata Usaha	7	890
678	Analisis Kebijakan Barang Milik Negara	7	890
679	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690
680	Pengadministrasi Kepegawaian	5	490
681	Penyuluh Kearsipan	7	890
682	Pengemudi	3	340
683	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	7	890
684	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	890
685	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	890
686	Pengelola Statistik Perikanan	6	690
687	Pengadministrasi Keuangan	5	490
688	Bendahara	7	890
689	Pengelola Gaji	6	690
690	Verifikator Keuangan	6	690
691	Pengelola Keuangan	6	690
692	Analisis Laporan Keuangan	7	890
BIDANG TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN			
693	Penguji Coba Pembibitan dan pembenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	7	890
694	Pengelola Budidaya dan Pengembangan tanaman Pangan	6	690
695	Pengelola Data Kebutuhan Bibit Tanaman Padi, Buah-Buahan dan Sayuran	6	690
696	Pengelola Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman	6	690
697	Analisis Sistem Informasi Hasil Pertanian	7	890

698	Analisis Kelembagaan	7	890
699	Pengelola Database Kelembagaan Petani	6	690
700	Pengelola Alat dan Mesin Pertanian	6	690
701	Pengelola Tata guna Lahan, Air, Sarana dan Prasarana Pertanian	6	690
702	Pengawas Pupuk dan Pestisida	7	890
703	Pengelola Perencanaan dan Pelaporan Usaha Tani Pertanian	6	690
704	Analisis Pengelola Data Komoditas Perkebunan	7	890
705	Penyuluh Perkebunan	7	890
706	Pengelola Teknologi Pascapanen	6	690
707	Pengawas Mutu Hasil Perkebunan	7	890
BIDANG KETAHANAN PANGAN			
708	Analisis Pangan	7	890
709	Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	6	690
710	Pengelola Pola Pangan Harapan	6	690
711	Pengelola Ketahanan Pangan	6	690
712	Penyuluh Pangan	7	890
713	Pengelola Keamanan Pangan Segar dan Pangan Jajanan Anak Sekolah	6	690
714	Analisis Pangan	7	890
715	Pengawas Harga Pangan	7	890
716	Pengelola Penganekaragaman Pangan	6	690
717	Analisis Pangan	7	890
BIDANG PERIKANAN DAN KELAUTAN			
718	Pengelola pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	6	690
719	Analisis Perlindungan dan Pelestarian Ikan	7	890
720	Analisis Kenelayanan	7	890
721	Analisis Kelautan dan Perikanan	7	890
722	Analisis Potensi Pembenihan	7	890
723	Analisis Budidaya Perikanan	7	890
724	Analisis Kesehatan Ikan dan Lingkungan	7	890
725	Analisis Mutu Hasil Perikanan	7	890
726	Pengelola Pengawasan Pengolahan, Pengangkutan dan Pemasaran Ikan	6	690
727	Penyusun Rencana Kelembagaan Pasar Hasil Perikanan	7	890
BIDANG PETERNAKAN DAN KESWAN		7	890
728	Pengelola Budidaya Pengembangan Ternak dan Hewan Lainnya	6	690
729	Pengawas Mutu Pakan	7	890
730	Pengawas Mutu Bibit Ternak	7	890
731	Pengelola Kesehatan Ternak Besar, Kecil dan Unggas	6	690
732	Pengelola Peternakan	6	690
733	Pengawas Sanitasi Usaha Ternak dan Kesmavet	7	890
734	Pengelola Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	6	690
735	Analisis Hasil Pertanian	7	890
UPTD BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN			
736	Pengadministrasi Umum	5	490
737	Penata Keuangan	7	890
738	Pengelola Teknologi Informasi	6	690
739	Analisis Barang Milik Negara	7	890
UPTD PUSKESWAN DAN IB			
740	Pengadministrasi Umum	5	490

741	Penata Keuangan	7	890
742	Pengelola Teknologi Informasi	6	690
743	Pengadministrasi Barang Milik Negara	5	490
UPT BALAI BENIH IKAN			
744	Pengadministrasi Umum	5	490
745	Pengadministrasi Keuangan	5	490
746	Analisis Kesehatan Ikan dan Lingkungan	7	890
747	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690
748	Pengelola Data	6	690
749	Analisis Benih	7	890
750	Penata Keuangan	7	890
751	Analisis Potensi Pembenihan	7	890
752	Pramu Benih Ikan	1	190
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN			
753	JF Penyuluh Pertanian Madya	11	2.030
754	JF Penyuluh Pertanian Muda	9	1.385
755	JF Penyuluh Pertanian Pertama	8	1.310
756	JF Penyuluh Pertanian Penyelia	8	1.260
757	JF Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan	7	1.035
758	JF Penyuluh Pertanian Pelaksana	6	770
759	JF Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula	5	570
760	JF Medik Veteriner Muda	9	1.355
761	JF Medik Veteriner Pertama	8	1.280
762	JF Paramedik Veteriner Pelaksana Penyelia	8	1.230
763	JF Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan	7	1.005
764	JF Paramedik Veteriner Pelaksana	6	740
765	JF Paramedik Veteriner Pelaksana Pemula	5	490
766	JF Analisis Ketahanan Pangan Muda	9	1.355
767	JF Analisis Ketahanan Pangan Pertama	8	1.280
768	JF Pengawas Perikanan Pertama	7	890
769	JF Arsiparis Pertama	8	1.280
770	JF Arsiparis Pelaksana	6	740
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
771	Pranata Kearsipan	6	690
772	Pramu Kebersihan	1	190
773	Pengemudi	3	340
774	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690
775	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	7	890
776	Analisis Tata Usaha	7	890
777	Pengadministrasi Persuratan	5	490
778	Pengadministrasi Kepegawaian	5	490
779	Bendahara	7	890
780	Penata Keuangan	7	890
781	Pengelola gaji	6	690
782	Pengadministrasi keuangan	5	490
783	Analisis Laporan Keuangan	7	890
BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
784	Pengadministrasi Kependudukan	5	490

785	Pemeriksa Kependudukan	7	890
786	Petugas Teknologi Informasi Komputer	5	490
787	Pengawas Kependudukan	7	890
788	Analisis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7	890
789	Pranata Kearsipan	6	690
790	Pengawas Kependudukan	7	890
791	Pengadministrasian Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, Pengangkatan dan Pengesahan anak	5	490
BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA			
792	Pranata Kearsipan	6	690
793	Analisis Sistem Kerjasama	7	890
794	Pengelola Sistem Informasi Kependudukan	6	690
795	Pengelola Data	6	690
796	Analisis Sistem Informasi	7	890
797	Analisis Kerjasama	7	890
DINAS PERHUBUNGAN			
SEKRETARIAT DINAS PERHUBUNGAN			
798	Analisis Jabatan	7	890
799	Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	7	890
800	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	7	890
801	Pengelola Barang Milik Negara	6	690
802	Pranata Barang dan jasa	6	690
803	Pramu Bakti	1	190
804	Pramu Kebersihan	1	190
805	Pengadministrasian Kepegawaian	5	490
806	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	890
807	Pengelola Data	6	690
808	Pengadministrasian Teknis Pemeriksaan dan Perawatan Kendaraan Bermotor	5	490
809	Pranata Pasukan Pengamanan Dalam	5	490
810	Pengadministrasian Umum	5	490
811	Pengemudi	3	340
812	Bendahara	7	890
813	Penata Keuangan	7	890
814	Pengolah Data	6	690
815	Pengelola gaji	6	690
816	Juru Pungut Retribusi	3	340
817	Pengadministrasian Penerimaan	5	490
BIDANG ANGKUTAN			
818	Analisis Lalu Lintas	7	890
819	Analisis Manajemen lalu Lintas	7	890
820	Analisis Teknis Survey Penanganan Dampak Transportasi Darat	7	890
821	Analisis Rencana Induk Jaringan Transportasi Darat	7	890
822	Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan	6	690
823	Pengelola Rekayasa Lalu Lintas	6	690
824	Teknisi Survey Jaringan Transportasi	6	690
825	Pengadministrasian LLAJ	5	490
826	Surveyor Penanganan Dampak Transportasi darat	7	890
827	Operator Global Positioning System	6	690
828	Analisis Perizinan	7	890

829	Analisis Rencana Umum Pemanduan Moda Transportasi Darat	7	890
830	Analisis Sistem Pemanduan Moda Transportasi Perkotaan	7	890
831	Analisis Teknis Survey Pemaduan Moda Transportasi Darat	7	890
832	Pengelola Perizinan Angkutan Jalan	6	690
833	Pengadministrasian Pelaporan dan Penyusunan Tarif Perkeretaapian	5	490
834	Pengawas dan Pembina Angkutan	7	890
835	Pengelola Sistem Pelayanan Angkutan	6	690
836	Pengelola Sarana Angkutan	6	690
837	Surveyor Pemaduan Mode Transportasi	7	890
838	Pengelola Sistem Pelayanan Angkutan	6	690
839	Pengelola Sistem Pelayanan Angkutan	6	690
840	Operator Speedboat	5	490
BIDANG TEKNIK SARANA DAN KESELAMATAN ANGKUTAN DARAT			
841	Pengembang Sarana dan Prasarana	7	890
842	Pengelola Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Jalan	6	690
843	Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	5	490
844	Pengawas Keselamatan darat / Jalan	7	890
845	Pengadministrasian Kecelakaan LLAJ	5	490
846	Operator Terminal	6	690
847	Penyidik	7	890
848	Pengemudi	3	340
849	Pemeriksa Lalu Lintas darat	7	890
UPTD PERPARKIRAN			
850	Penata Keuangan	7	890
851	Pengadministrasian Keuangan	5	490
852	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690
853	Pengelola Program dan Laporan	6	690
854	Pengadministrasian Kepegawaian	5	490
855	Petugas Keamanan	3	340
856	Pengemudi	3	340
857	Penyidik	7	890
858	Pengelola Perpustakaan	6	690
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
SEKRETARIAT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
859	Pengadministrasian Persuratan	5	490
860	Pengadministrasian Kepegawaian	5	490
861	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	7	890
862	Petugas Keamanan	3	340
863	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	890
864	Pramu Bakti	1	190
865	Pengemudi	3	340
866	Pengelola Barang Milik Negara	6	690
867	Analisis Kebijakan Klasifikasi Barang	7	890
868	Bendahara	7	890
869	Verifikator Keuangan	6	690
870	Analisis Laporan Keuangan	7	890
871	Pengelola Gaji	6	690
872	Penata Keuangan	7	890
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK			
873	Operator Telekomunikasi	5	490

874	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	890
875	Tenaga Peliputan	6	690
876	Analisis Pengaduan Masyarakat	7	890
877	Pengelola Media Cetak	6	690
878	Pengelola Media Center dan Kemitraan Media	6	690
879	Analisis Berita	7	890
880	Pengolah Data Penyuluhan dan Layanan Informasi	6	690
881	Analisis Kerjasama	7	890
882	Analisis Penyuluhan dan Layanan Informasi	7	890
BIDANG PENYELENGGARAAN E- GOVERNMENT			
883	Pengelola Teknologi Informasi	6	690
884	Pengolah Data dan Aplikasi	6	690
885	Penyuluh Teknik Informatika	7	890
886	Teknisi Jaringan Instalasi	5	490
887	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan	7	890
888	Petugas Teknologi Informasi Komputer	5	490
889	Analisis Pengaduan Masyarakat	7	890
890	Pengelola Situs/WEB	6	690
891	Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik	6	690
892	Pengendali Teknologi Informasi	7	890
DINAS PERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH			
SEKRETARIAT DINAS PERINDAGKOP DAN UKM			
893	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690
894	Pengelola Kepegawaian	6	690
895	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	7	890
896	Petugas Teknologi Informasi Komputer	5	490
897	Analisis Jabatan	7	890
898	Pengadministrasi Umum	5	490
899	Pengadministrasi Persuratan	5	490
900	Pengelola Program dan Pelaporan	6	690
901	Bendahara	7	890
902	Penata Keuangan	7	890
903	Verifikator Keuangan	6	690
904	Pengelola Gaji	6	690
BIDANG KOPERASI DAN UKM			
905	Analisis Koperasi	7	890
906	Penyuluh Koperasi	7	890
907	Pengelola Kebijakan Kelembagaan Koperasi	6	690
908	Penelaah Pengembangan Usaha	7	890
909	Fasilitator Kewirausahaan	7	890
910	Penyusun Rencana Pengembangan Produk Skala Mikro Kecil Menengah	7	890
911	Pengelola Pengembangan Inkubasi Bisnis dan Workshop	6	690
BIDANG PERINDUSTRIAN			
912	Analisis Data Sertifikasi Industri Pangan	7	890
913	Analisis Pengembangan Usaha Agro Industri	7	890
914	Pengadministrasi Identifikasi dan Evaluasi Sentra Pengolahan Produk	5	490
915	Analisis Industri	7	890
916	Analisis Kerjasama Industri	7	890
917	Pengelola Hubungan Kerjasama Hubungan Industri	6	690

BIDANG PERDAGANGAN			
918	Analisis Perdagangan	7	890
919	Fasilitator Perdagangan	7	890
920	Pengelola Pameran dan Peragaan	6	690
921	Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	7	890
922	Penyusun Perkembangan Harga dan Pengkajian Pasar	7	890
923	Pengelola Fasilitasi dan Mediasi Perlindungan Konsumen	6	690
UPTD METROLOGI LEGAL			
924	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690
925	Penata Keuangan	7	890
926	Analisis Rencana dan Program Kegiatan	7	890
927	Pengadministrasian Kepegawaian	5	490
928	Pengelola Keuangan	6	690
929	Petugas Teknologi Informasi Komputer	5	490
930	JF Penera Pertama	8	1.280
931	JF Penera Penyelia	8	1.230
932	Pengawas Kemetrologian	7	890
UPTD PASAR PARIAMAN			
933	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690
934	Penata Keuangan	7	890
935	Analisis Rencana dan Program Kegiatan	7	890
936	Pengadministrasian Kepegawaian	5	490
937	Pengelola Keuangan	6	690
938	Petugas Teknologi Informasi Komputer	5	490
939	Analisis Pengembangan Pasar	7	890
940	Penyusun Rencana Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar	7	890
941	Juru Pungut Retribusi	3	340
942	Teknisi Gedung/Bangunan	5	490
943	Teknisi Listrik, Telepon, AC, dan Lift	5	490
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			
SEKRETARIAT DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			
944	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	890
945	Pengelola Administrasi Pemerintahan	6	690
946	Analisis Barang Milik Negara	7	890
947	Bendahara	7	890
948	Pengelola Gaji	6	690
949	Pengadministrasian Keuangan	5	490
950	Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak, dan Retribusi	6	690
951	Pengelola Keuangan	6	690
BIDANG KEBUDAYAAN			
952	Analisis Sumber Sejarah	7	890
953	Analisis Data Cagar Budaya dan Koleksi Museum	7	890
954	Analisis Kesenian dan Budaya Daerah	7	890
955	Pengelola Data Nilai Budaya	6	690
BIDANG PROMOSI DAN KERJASAMA			
956	Analisis Perencanaan dan Kerjasama	7	890
957	Analisis Pasar	7	890
958	Pemandu Wisata	6	690
959	Pengelola Promosi dan Informasi Wisata	6	690

BIDANG DESTINASI DAN DAYA TARIK WISATA			
960	Analisis Objek Wisata	7	890
961	Analisis Pariwisata	7	890
962	Pengelola Usaha Kepariwisata	6	690
963	Penyuluh Pariwisata	7	890
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
SEKRETARIAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
964	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	890
965	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	7	890
966	Pengelola Program dan Kegiatan	6	690
967	Pengelola Barang	6	690
968	Pengadministrasi Umum	5	490
969	Analisis Laporan Keuangan	7	890
970	Bendahara	7	890
971	Pengelola Gaji	6	690
972	Pengemudi	3	340
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
973	Analisis Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	7	890
974	Pengelola Data	6	690
975	Pengadministrasi Persuratan	5	490
976	Analisis Sosial Budaya	7	890
977	Pengelola Data	6	690
978	Pengadministrasi Persuratan	5	490
979	Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan	7	890
980	Pengelola Data	6	690
981	Pengadministrasi Persuratan	5	490
BIDANG PEMERINTAHAN DESA			
982	Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa	6	690
983	Analisis Desa	7	890
984	Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa	6	690
985	Pengadministrasi Persuratan	5	490
986	Penyusun Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan	7	890
987	Pengelola Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	6	690
988	Pengadministrasi Persuratan	5	490
989	Penyusun Rencana Peningkatan Peran Serta Masyarakat	7	890
990	Pengelola Data	6	690
991	Pengadministrasi Persuratan	5	490
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR			
SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR			
992	Pengelola Barang Milik Negara	6	690
993	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	7	890
994	Pengadministrasi Kepegawaian	5	490
995	Petugas Protokol	5	490
996	Analisis Data dan Informasi	7	890
997	Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan	7	890
998	Penata Keuangan	7	890
999	Pengadministrasi Keuangan	5	490
1000	Pengolah Data Pembendaharaan	6	690
1001	Bendahara	7	890

BIDANG TRATIBUM, PEMADAM DAN LINMAS			
1002	Analisis Tata Usaha	7	890
1003	Pranata Pemadam Kebakaran	6	690
1004	Pengemudi Pemadam Kebakaran	5	490
1005	Pelatih Satuan Perlindungan Masyarakat	6	690
1006	Pranata Perlindungan Masyarakat	6	690
1007	Analisis Tata Usaha	7	890
1008	Analisis Tata Praja	7	890
1009	Petugas Keamanan	3	340
1010	Pengadministrasi Umum	5	490
BIDANG PENEGAK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA			
1011	Penyidik	7	890
1012	Pengadministrasi Penanganan Perkara	5	490
1013	Pengadministrasi Umum	5	490
1014	Petugas Penindakan	7	890
1015	Pengadministrasi Umum	5	490
1016	Analisis Tata Usaha	7	890
1017	Pranata Pasukan Pengamanan Dalam	5	490
1018	Pembina Jasmani Dan Mental	6	690
1019	Pengadministrasi Umum	5	490
1020	Analisis Satuan Pengawas Internal	7	890
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
SEKRETARIAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
1021	Pengadministrasi Umum	5	490
1022	Pengadministrasi Kepegawaian	5	490
1023	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur	7	890
1024	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690
1025	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	7	890
1026	Analisis Perencanaan dan Program Kegiatan	7	890
1027	Analisis Perencanaan dan Penganggaran	7	890
1028	Analisis Perencanaan	7	890
1029	Bendahara	7	890
1030	Pengelola Gaji	6	690
1031	Verifikator Keuangan	6	690
1032	Pengadministrasi Keuangan	5	490
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
1033	Analisis Penelitian Dan Pengembangan	7	890
1034	Penyusun Penelitian dan Pengembangan	7	890
1035	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	7	890
1036	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	6	690
BIDANG EKONOMI			
1037	Analisis Pariwisata	7	890
1038	Analisis Ekonomi	7	890
1039	Analisis Program Kegiatan Pembangunan Pertanian	7	890
1040	Analisis Kelautan dan Perikanan	7	890
BIDANG SARANA DAN PRASARANA WILAYAH			
1041	Analisis Infrastruktur	7	890
1042	Analisis Tata Ruang	7	890
1043	Analisis Lingkungan Hidup	7	890
1044	Pengelola Geospasial	6	690

1045	Pengawas Fisik Pemukiman	7	890
BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA			
1046	Analisis Pemerintah Daerah	7	890
1047	Pengelola Rencana Pemerintahan Umum	6	690
1048	Analisis Sosial Budaya	7	890
1049	Analisis Perencanaan Strategis	7	890
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH			
SEKRETARIAT BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH			
1050	Pengadministrasi Umum	5	490
1051	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690
1052	Pengadministrasi Kepegawaian	5	490
1053	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	890
1054	Pengemudi	3	340
1055	Bendahara	7	890
1056	Penata Keuangan	7	890
1057	Verifikator Keuangan	6	690
1058	Pengadministrasi Keuangan	5	490
1059	Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	6	690
BIDANG ANGGARAN			
1060	Penyusun Rencana Keuangan	7	890
1061	Pengelola Anggaran	6	690
1062	Analisis Sistem Informasi Anggaran	7	890
1063	Pengelola Data Perencanaan Anggaran	6	690
1064	Pengadministrasi Anggaran	5	490
BIDANG PERBENDAHARAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN			
1065	Analisis Pengembangan Sistem Perbendaharaan	7	890
1066	Pengelola Pelaporan Data Penerimaan	6	690
1067	Analisis Perbendaharaan	7	890
1068	Pengelola Data Transaksi	6	690
1069	Analisis Laporan Keuangan	7	890
1070	Penyusunan Laporan Keuangan	7	890
1071	Pengelola Akuntansi	6	690
BIDANG BARANG MILIK DAERAH (ASET)			
1072	Analisis Aset Negara	7	890
1073	Pengelolaan Tuntutan Ganti Rugi	6	690
1074	Pengadministrasi Persuratan	5	490
1075	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690
1076	Analisis Kebijakan Barang Milik Daerah	7	890
BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI PENDAPATAN			
1077	Pengelola Penagihan dan Pengawasan	6	690
1078	Analisis Pajak/Retribusi Daerah	7	890
1079	Pengadministrasi Umum	5	490
1080	Analisis Pendapatan Daerah	7	890
1081	Pengelola Pendapatan	6	690
BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN			
1082	Analisis Pendapatan Daerah	7	890
1083	Pengelola Realisasi Laporan Penerimaan Retribusi Daerah	6	690
1084	Pengadministrasi Umum	5	490
1085	Analisis Penagihan Pajak	7	890
1086	Pengelola Wajib Pajak/ Retribusi Daerah	6	690

1087	Pengelola Pendapatan	6	690
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
1088	Bendahara	7	890
1089	Penata Laporan Keuangan	7	890
1090	Analisis Layanan Umum	7	890
1091	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	7	890
BIDANG MUTASI DAN INFORMASI			
1092	Analisis Sistem Informasi	7	890
1093	Analisis Tata Praja	7	890
1094	Pengelola Formasi dan pengadaan Kepegawaian	6	690
1095	Pengelola Kepegawaian	6	690
1096	Analisis Kepegawaian	7	890
BIDANG PENGEMBANGAN SDM DAN PEMBINAAN APARATUR			
1097	Pengelola Disiplin Pegawai	6	690
1098	Penyuluh Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	7	890
1099	Analisis Pengembangan Karir	7	890
1100	Analisis kebutuhan diklat	7	890
1101	Pengelola pengembangan diklat	6	690
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
1102	Bendahara	7	890
1103	Pengadministrasi Keuangan	5	490
1104	Penyusun Laporan Keuangan	7	890
1105	Verifikator Keuangan	6	690
1106	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur	7	890
1107	Analisis Data dan Informasi	7	890
1108	Pengadministrasi Umum	5	490
1109	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690
1110	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	7	890
1111	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	490
BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN			
1112	Penyuluh Bencana	7	890
1113	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	490
1114	Analisis Mitigasi Bencana	7	890
1115	Pengadministrasi Umum	5	490
1116	Penyuluh Bencana Kesiapsiagaan	7	890
BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK			
1117	Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik	7	890
1118	Koordinator Pergudangan	6	690
1119	Analisis Mitigasi Bencana	7	890
1120	Pengolah Data	6	690
1121	Analisis Bencana	7	890
1122	Pengadministrasi Umum	5	490
BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI			
1123	Analisis Rehabilitasi Sosial	7	890
1124	Pengelola Bimbingan dan Konseling	6	690
1125	Pengolah Data	6	690
1126	Analisis Pembangunan	7	890

<i>KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</i>			
1127	Bendahara	7	890
1128	Pengelola Program dan laporan	6	690
1129	Pengadministrasi Umum	5	490
1130	Pengadministrasi Kepegawaian	5	490
1131	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690
1132	Pengadministrasi Keuangan	5	490
1133	Verifikator Keuangan	6	690
1134	Pengelola Gaji	6	690
1135	Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi	6	690
1136	Analisis Wawasan Kebangsaan	7	890
1137	Analisis Sosial Budaya	7	890
1138	Pengadministrasi Umum	5	490
1139	Analisis Karakter	7	890
1140	Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi	6	690
1141	Analisis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	7	890
1142	Analisis Intelijen	7	890
1143	Analisis Pemilihan Umum	7	890
1144	Pengolah Data Kelembagaan	6	690
1145	Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi	6	690
1146	Analisis Partai Politik	7	890
1147	Analisis Kelembagaan dan Organisasi	7	890
<i>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SADIKIN</i>			
<i>BAGIAN TATA USAHA</i>			
1148	Penata Keuangan	7	890
1149	Pengadministrasi Keuangan	5	490
1150	Pengadministrasi Penerimaan	5	490
1151	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690
1152	Analisis Data dan Informasi	7	890
1153	Pengadministrasi Umum	5	490
1154	Pranata Sumber Daya IPTEK	6	690
1155	Pengambil Sampel	5	490
1156	Pengemudi Ambulan	4	440
1157	Pramu Kebersihan	1	190
1158	Pengolah Data	6	690
1159	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690
1160	Analisis Perencanaan Anggaran	7	890
1161	Analisis Kehidupan Agama	7	890
1162	Teknik Listrik dan Jaringan	5	490
1163	Teknisi Elektronik	5	490
1164	Pemulasaran Jenazah	3	340
1165	Pengolah Makanan	6	690
1166	Pranata Jamuan	5	490
1167	Petugas Keamanan	3	340
1168	Analisis Keselamatan Kerja	7	890
<i>JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU RSUD dr. SADIKIN</i>			
1169	JF Apoteker Madya	11	1.945
1170	JF Apoteker Muda	9	1.370
1171	JF Apoteker Pertama	8	1.295
1172	JF Asisten Apoteker Pelaksana	6	755

1173	JF Bidan Madya	11	1.930
1174	JF Bidan Penyelia	8	1.230
1175	JF Bidan Pertama	8	1.280
1176	JF Bidan Pelaksana Lanjutan	7	1.005
1177	JF Bidan Pelaksana	6	740
1178	JF Dokter Gigi Madya	12	2.225
1179	JF Dokter Gigi Pertama	9	1.370
1180	JF Dokter Muda	10	1.720
1181	JF Dokter Pertama	9	1.570
1182	JF Nutrisionis Muda	9	1.555
1183	JF Nutrisionis Pertama	8	1.280
1184	JF Nutrisionis Pelaksana Lanjutan	7	1.005
1185	JF Nutrisionis Pelaksana	6	740
1186	JF Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	7	1.035
1187	JF Perawat Gigi Pelaksana	6	770
1188	JF Perawat Muda	9	1.385
1189	JF Perawat Penyelia	8	1.260
1190	JF Perawat Pertama	8	1.310
1191	JF Perawat Pelaksana Lanjutan	7	1.035
1192	JF Perawat Pelaksana	6	770
1193	JF Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	7	1.035
1194	JF Perekam Medis Pelaksana	6	770
1195	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	9	1.355
1196	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	8	1.280
1197	JF Pranata Laboratorium Pelaksana Lanjutan	7	1.005
1198	JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	6	740
1199	JF Refraksi Optisien Pelaksana Lanjutan	7	1.035
1200	JF Refraksi Optisien Pelaksana	6	770
1201	JF Sanitarian Muda	9	1.370
1202	JF Sanitarian Penyelia	8	1.245
1203	JF Sanitarian Pertama	8	1.295
1204	JF Sanitarian Pelaksana	6	755
1205	JF Penata Anestesi Pelaksana	6	770
1206	JF Asisten Penata Anestesi Pelaksana	6	770
1207	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana	6	770
1208	JF Radiografer Pelaksana	6	770
1209	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	1.310
1210	JF Epidemiolog Pertama	8	1.280
1211	JF Epidemiolog Muda	9	1.555
<i>KECAMATAN PARIAMAN SELATAN</i>			
1212	Pranata Kearsipan	6	690
1213	Pengelola Data	6	690
1214	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690
1215	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	7	890
1216	Pengadministrasi Umum	5	490
1217	Penata Keuangan	7	890
1218	Bendahara	7	890
1219	Pengadministrasi Keuangan	5	490
1220	Pengelola Keuangan	6	690
1221	Pengelola Gaji	6	690

1222	Analisis Pelayanan	7	890
1223	Pengadministrasi Pemerintahan	5	490
1224	Pengadministrasi Umum	5	490
1225	Pranata Kearsipan	6	690
1226	Penyuluh Keamanan Masyarakat	7	890
1227	Pengelola Data	6	690
1228	Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	6	690
1229	Analisis Pemberdayaan Masyarakat	7	890
1230	Pengadministrasi Umum	5	490
1231	Penyuluh Kemasyarakatan	7	890
<i>KECAMATAN PARIAMAN TIMUR</i>			
1232	Analisis Pelayanan Umum	7	890
1233	Analisis Sistem Informasi	7	890
1234	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690
1235	Pengadministrasi Persuratan	5	490
1236	Pengadministrasi Umum	5	490
1237	Verifikator Keuangan	6	690
1238	Bendahara	7	890
1239	Pengadministrasi Keuangan	5	490
1240	Pengelola Keuangan	6	690
1241	Pengelola Gaji	6	690
1242	Analisis Pelayanan	7	890
1243	Analisis Pemerintah Daerah	7	890
1244	Pengadministrasi Umum	5	490
1245	Pranata Kearsipan	6	690
1246	Penyuluh Keamanan Masyarakat	7	890
1247	Pengadministrasi Umum	5	490
1248	Pengelola Data	6	690
1249	Pengadministrasi Umum	5	490
1250	Analisis Pemberdayaan Masyarakat	7	890
1251	Pengelola Data	6	690
1252	Pengadministrasi Umum	5	490
1253	Penyuluh Kemasyarakatan	7	890
1254	Pengelola Data	6	690
<i>KECAMATAN PARIAMAN UTARA</i>			
1255	Pranata Kearsipan	6	690
1256	Analisis Sistem Informasi	7	890
1257	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690
1258	Pengadministrasi Persuratan	5	490
1259	Pengadministrasi Umum	5	490
1260	Pengelola data	6	690
1261	Analisis Laporan Keuangan	7	890
1262	Bendahara	7	890
1263	Pengadministrasi Keuangan	5	490
1264	Pengelola Keuangan	6	690
1265	Pengelola Gaji	6	690
1266	Analisis Pelayanan	7	890
1267	Pengelola Data	6	690
1268	Pengadministrasi Pemerintahan	5	490
1269	Pengadministrasi Umum	5	490

1270	Pranata Kearsipan	6	690
1271	Penyuluh Keamanan Masyarakat	7	890
1272	Pengadministrasi Umum	5	490
1273	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	6	690
1274	Pengadministrasi Umum	5	490
1275	Analisis Pemberdayaan Masyarakat	7	890
1276	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	6	690
1277	Pengadministrasi Umum	5	490
1278	Penyuluh Kemasyarakatan	7	890
1279	Pengelola Kesejahteraan Sosial	6	690
<i>KECAMATAN PARIAMAN TENGAH</i>			
1280	Pranata Kearsipan	6	690
1281	Analisis Sistem Informasi	7	890
1282	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6	690
1283	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	7	890
1284	Pengadministrasi Umum	5	490
1285	Verifikator Keuangan	6	690
1286	Bendahara	7	890
1287	Pengadministrasi Keuangan	5	490
1288	Pengelola Keuangan	6	690
1289	Pengelola Gaji	6	690
1290	Analisis Pelayanan	7	890
1291	Pengadministrasi Pemerintahan	5	490
1292	Pengadministrasi Umum	5	490
1293	Pranata Kearsipan	6	690
1294	Penyuluh Keamanan Masyarakat	7	890
1295	Pengadministrasi Umum	5	490
1296	Pengadministrasi Umum	5	490
1297	Analisis Pemberdayaan Masyarakat	7	890
1298	Pengadministrasi Umum	5	490
1299	Penyuluh Kemasyarakatan	7	890
<i>1. KELURAHAN JATI HILIR</i>			
1300	Pengadministrasi Umum	5	490
1301	Pengelola Keuangan	6	690
<i>2. KELURAHAN KAMPUNG PONDOK</i>			
1302	Pengadministrasi Umum	5	490
1303	Pengelola Keuangan	6	690
<i>3. KELURAHAN KAMPUNG JAWA I</i>			
1304	Pengadministrasi Umum	5	490
1305	Pengelola Keuangan	6	690
<i>4. KELURAHAN KAMPUNG JAWA II</i>			
1306	Pengadministrasi Umum	5	490
1307	Pengelola Keuangan	6	690
<i>5. KELURAHAN JAWI-JAWI I</i>			
1308	Pengadministrasi Umum	5	490
1309	Pengelola Keuangan	6	690
<i>6. KELURAHAN JAWI-JAWI II</i>			
1310	Pengadministrasi Umum	5	490
1311	Pengelola Keuangan	6	690
<i>7. KELURAHAN ALAI GELOMBANG</i>			
1312	Pengadministrasi Umum	5	490

1313	Pengelola Keuangan	6	690
<i>8. KELURAHAN PONDOK II</i>			
1314	Pengadministrasi Umum	5	490
1315	Pengelola Keuangan	6	690
<i>9. KELURAHAN KAMPUNG PERAK</i>			
1316	Pengadministrasi Umum	5	490
1317	Pengelola Keuangan	6	690
<i>10. KELURAHAN JALAN BARU</i>			
1318	Pengadministrasi Umum	5	490
1319	Pengelola Keuangan	6	690
<i>11. KELURAHAN JALAN KERETA API</i>			
1320	Pengadministrasi Umum	5	490
1321	Pengelola Keuangan	6	690
<i>12. KELURAHAN LOHONG</i>			
1322	Pengadministrasi Umum	5	490
1323	Pengelola Keuangan	6	690
<i>13. KELURAHAN UJUNG BATUNG</i>			
1324	Pengadministrasi Umum	5	490
1325	Pengelola Keuangan	6	690
<i>14. KELURAHAN PASIR</i>			
1326	Pengadministrasi Umum	5	490
1327	Pengelola Keuangan	6	690
<i>15. KELURAHAN TARATAK</i>			
1328	Pengadministrasi Umum	5	490
1329	Pengelola Keuangan	6	690
<i>16. KELURAHAN KARAN AUR</i>			
1330	Pengadministrasi Umum	5	490
1331	Pengelola Keuangan	6	690

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 8 TAHUN 2019
 TANGGAL : 25 FEBRUARI 2019
 TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH
 KOTA PARIAMAN

FORMAT LAPORAN KINERJA PEGAWAI PER HARI

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :
 Tanggal :

No.	Uraian Kegiatan	Pukul		
		Mulai	Selesai	Lama
Total				

Atasan Langsung Pejabat Penilai,

Dibuat Oleh :

.....
 NIP.

.....
 NIP.

WALIKOTA PARIAMAN

d.t.o

GENIUS UMAR

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 8 TAHUN 2019
 TANGGAL : 25 FEBRUARI 2019
 TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH
 KOTA PARIAMAN

REKAP LAPORAN KINERJA PEGAWAI

Bulan : Tahun

No.	Nama	Jabatan	Target Kinerja	Realisasi Kerja	Persentase	Ket

Pariaman,

Diketahui Oleh,

sekretaris

.....
 NIP.

Dibuat Oleh,

kasubag umum

.....
 NIP.....

Disetujui Oleh,

kepala perangkat daerah

.....
 NIP.

WALIKOTA PARIAMAN

d.t.o

GENIUS UMAR

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 8 TAHUN 2019
TANGGAL : 25 FEBRUARI 2019
TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PARIAMAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Nip :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada daftar perhitungan tambahan penghasilan bulan....., bagi.....(SKPD) telah dihitung dengan benar dan berdasarkan daftar hadir kerja Pegawai Negeri Sipil pada.....
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran tambahan penghasilan tersebut, kami bersedia untuk mengembalikan kelebihan tersebut ke kas daerah.

Demikianlah pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Pariaman,.....
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Nama

WALIKOTA PARIAMAN

d.t.o

GENIUS UMAR